



ARC Working Paper

ISSN 2541-0121

No. 002 - September 2016

Masyarakat Dusun Bonto, Desa Kompang,
Kec. Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan

Catatan Awal

Sityi M. Qoriah



9 772541 012019

**Masyarakat Dusun Bonto, Desa Kompang,
Kecamatan Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan**

Sityi m. Qoriah

Working Paper ini merupakan hasil dari penelusuran lapangan selama proses Pelatihan Penelitian dengan Metode Participatory Action Research (PAR), yang diselenggarakan oleh Sekolah Rakyat Payo-payo, pada bulan Agustus s.d. November 2015.

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia

ARC Books, September 2016

©ARC Books, 2016

Qoriah, Sityi M.

Masyarakat Dusun Bonto, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan

Penyunting: Hilma Safitri

ARC Books

Jalan Ice Skating No. 33 Arcamanik

Bandung, 40293—INDONESIA

Telp/fac: 022-7237799

Email: arc.indonesia@gmail.com

Katalog Dalam Terbitan

Qoriah, Sityi M

Masyarakat Dusun Bonto, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan

Working Paper ARC No. 002/2016

Bandung, ARCBooks, 2016

52 hlm;

ISSN 2541-0121

Diterbitkan atas kerjasama:

ARC dan CCFD Terre Solidaire

Masyarakat Dusun Bonto, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan

Catatan Awal

ARC Working Paper
No. 002—September 2016

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	6
Daftar Grafik	6
Daftar Singkatan	7
Daftar Istilah dalam Bahasa Konjo	8
Riwayat Dusun Bonto, Desa Kompang	10
Dusun Bonto sebagai Lokasi Gerilyawan NII/TII	12
Perubahan Sistim Pemerintahan Lokal	14
Topografi Wilayah	16
Kependudukan	18
Bahasa	19
Mata Pencaharian	19
Potensi Sumberdaya Alam di Dusun Bonto	20
Komoditas Pertanian	21
Komoditas Perkebunan	22
Kopi	22
Cengkeh	23
Kelapa	23
Kakao	24
Kemiri	24
Pala	24
Komoditas Hasil Hutan	25
Aren	25
Langsat	25
Manggis	25
Rambutan	26
Durian	26
Cengkeh di Dusun Bonto	26
Kakao di Dusun Bonto	32
Hutan, Hutan Pinus dan Perlawanan Rakyat untuk Penghidupan	35
Politik Kebijakan Kehutanan di Sulawesi Selatan	35
Hutan Pinus di Dusun Bonto dan Lahan Pertanian Rakyat	39

Penolakan Warga Terhadap Kehadiran Hutan Pinus	41
Kesimpulan dan Kajian Selanjutnya	42
Daftar Rujukan	45
Daftar Peraturan	48
Daftar Informan	49
Biodata Penulis	50
Lampiran	51

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Nama Kepala Desa di Desa Kompang, Tahun 1961 – 2008.....	9
Tabel 2. Jumlah Pemakai Bendungan Ere Munrangi, Tahun 2007	10
Tabel 3. Data Kependudukan Desa Kompang, Tahun 2009-2014	11
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Kompang Tahun 2015	12
Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kompang Kec. Sinjai Tengah.....	13
Tabel 6. Sejarah Perkembangan Komoditas di Desa Kompang.....	13
Tabel 7. Perkembangan Luas Areal Tanaman Cengkeh di Indonesia berdasarkan Status Pengusahaan.....	21
Tabel 8. Kalender Musim Kegiatan Dusun Bonto.....	22
Tabel 9. Perkembangan Luas Areal Tanaman Kakao di Indonesia berdasarkan Status Pengusahaan.....	23
Tabel 10. Hasil Produksi Kakao di Sulawesi Selatan	24

Daftar Gambar

Gambar 1. Letak Desa Kompang	4
Gambar 2. Peta Desa Kompang	5
Gambar 3. Sketsa Peta Dusun Bonto	6

Daftar Grafik

Grafik 1. Perkembangan Harga Cengkeh, 1983-2012	21
Grafik 2. Perkembangan Harga Kakao di Tingkat Produsen di Indonesia, 1996-2012.....	25

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sinjai Tengah Berdasarkan Desa, Tahun 2009-2014	51
Lampiran 2. Matapencaharian Penduduk Desa Kompang, 2010	52

Daftar Istilah dalam Bahasa Konjo

<i>Bonto</i>	dahi yang menonjol
<i>Karaeng</i>	raja
<i>Puang</i>	panggilan untuk tetua di sebuah dusun/kampung
<i>Gurilla</i>	gerombolan
<i>Pattontongan</i>	jendela
<i>Gella</i>	istilah untuk wilayah yang saat ini disebut desa
<i>Puang Gella</i>	kepala desa
<i>Sariang</i>	dusun
<i>Puang sari</i>	kepala dusun
<i>Ere</i>	air
<i>Munrangi</i>	tergenang
<i>Olo'-olo'</i>	ulat hijau
<i>Anango</i>	walang sangit
<i>Sarabba</i>	minuman khas masyarakat Bugis, yang dibuat dari jahe, gula merah dan santan

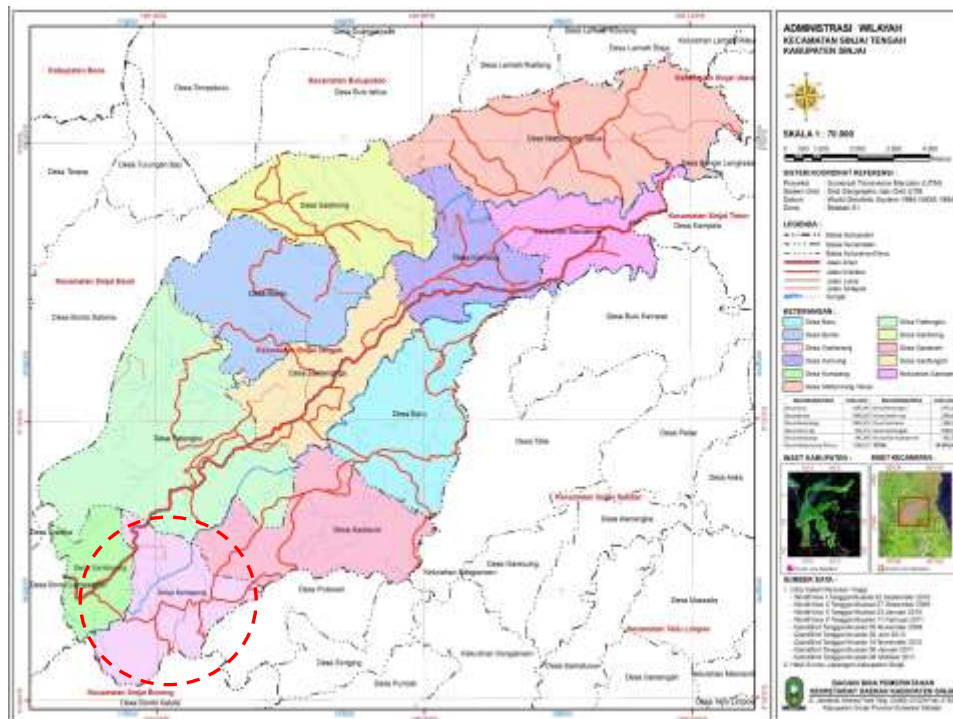
Daftar Singkatan

AD	Angkatan Darat
APRIS	Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
BPKC	Bakter Pembuluh Kayu Cengkeh
BPPC	Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CDC	Cacar Daun Cengkeh
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
GDC	Gugur Daun Cengkeh
Gernas	Gerakan Nasional
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
Inpres	Instruksi Presiden
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Keppres	Keputusan Presiden
KGSS	Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan
KHm	Hutan Kemasyarakatan
KMB	Konferensi Meja Bundar
KNIL	<i>Koninklijk Nederlands Indisch Leger</i> (Tentara Kolonial Hindia Belanda)
KUD	Koperasi Unit Desa
MCK	Mandi Cuci Kakus
NAD	Nangroe Aceh Darussalam
Nasakom	Nasional Agama Komunis
NII	Negara Islam Indonesia
NII/TII	Negara Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBK	Penggerek Batang Kakao
Perda	Peraturan Daerah
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PRPTE	Proyek Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor
RIS	Republik Indonesia Serikat
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDTC	Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TRI	Tentara Republik Indonesia
UU	Undang-undang
VCD	Vascular Streak Dieback

Riwayat Dusun Bonto, Desa Kompang

Dusun Bonto¹ merupakan salah satu dusun di desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kompang (lihat Gambar 1) terletak 30 km sebelah barat Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemukiman warga terletak di lereng-lereng dengan kemiringan 30-70 derajat dengan ketinggian 400-700 mdpl. Pada bulan September hingga akhir November 2015, iklim desa Kompang, khususnya dusun Bonto bersuhu 24°C pada malam hari dan 30°C pada siang hari. Dusun Bonto berada di ketinggian sekitar 478 mdpl. Dusun Bonto terletak di sekitar garis lintang: S 5,233941° dan garis bujur : E 120.119038° (Tim Peneliti Payo-payo 2015). Sebelah Utara Desa Kompang berbatasan dengan Desa Pattongko. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gantarang dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saotanre. Sebelum menjadi desa, dahulu Kompang merupakan peninggalan dari kerajaan kecil yaitu Kerajaan Kompang (senantiasa menjalin kerjasama dengan Kerajaan Gowa Tallo), sehingga berpengaruh terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakatnya mirip dengan kebiasaan Kerajaan Gowa Tallo.

Gambar 1. Letak Desa Kompang



Sumber: http://www.sinjaikab.go.id/v2/images/peta/Sinjai_Tengah.jpg

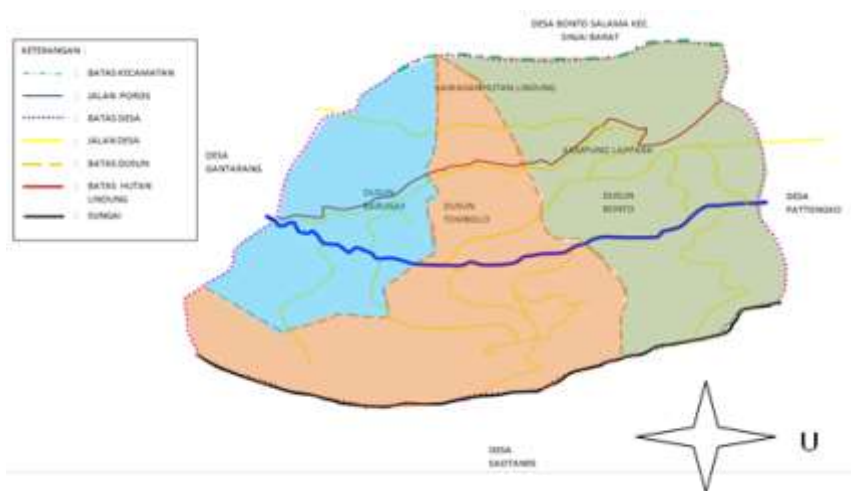
Dusun Bonto adalah salah satu nama dusun di Desa Kompang. Dua dusun lainnya adalah dusun Tombolo dan dusun Barugae. Dusun Bonto berbatasan dengan dusun Tombolo di sebelah Barat dan terletak di bagian Utara desa Kompang (lihat Gambar 2). Sebelumnya terdapat satu dusun lagi yang men-

¹ *Bonto* dalam bahasa Konjo (bahasa asli yang digunakan oleh warga Dusun Bonto) berarti dahi yang menonjol. Bonto digambarkan dengan dahi atau jidat karena kontur wilayah dusun Bonto serupa dengan dahi manusia.

jadi bagian dari Desa Kompang, yaitu Dusun Gantarang, yang sejak tahun 2006 statusnya menjadi desa sendiri, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Kompang dan Pembentukan Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah².

Berdasarkan keterangan dari warga³ yang pertama kali memberikan nama Bonto adalah *karaeng* (raja) Pattontongan⁴. *Karaeng* Pattontongan datang ke dusun Bonto sebelum Islam masuk, warga mempercayai (serta berdasarkan cerita-cerita dari nenek moyang terdahulu) gelar *Karaeng* Pattontongan merupakan gelar lain dari *karaeng* di Bone⁵. Penuturan salah seorang warga bahwa Pattontongan merupakan tempat atau kantor nenek moyang orang Kompang tinggal, bahkan kuburan-kuburannya pun berada di Pattontongan⁶. Dalam perjalanannya orang-orang Pattontongan harus siap siaga menghadapi serangan dari kerajaan lain, terutama dari kerajaan Bone. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, sehingga orang-orang yang tinggal di Pattontongan mulai turun dan membentuk pemukiman di Lappara⁷. Lappara' merupakan wilayah yang cukup datar untuk dibangun rumah-rumah. Bersamaan dengan berakhirnya masa *kekaraengan* Pattontongan, orang-orang pun mulai tinggal dan menghuni kampung Lappara'.

Gambar 2. Peta Desa Kompang



Sumber: (Kompang 2015)

² Pada Perda No. 17 tahun 2005, pada Bab II Pasal 3 ayat 1; wilayah desa Kompang sebelum dilakukannya pemekaran meliputi dusun Tomobolo, dusun Bonto, dusun Bonto Laisa dan dusun Gantarang. Namun, setelah pemekaran dalam Bab II Pasal 4 ayat 1; wilayah desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah meliputi dusun Tomobolo, dusun Bonto dan dusun Barugae.

³ Wawancara dengan Kepala Dusun Bonto, Sultan Alwy, pada 15 Oktober 2015.

⁴ Pattontongan (bahasa Konjo) berarti jendela.

⁵ Sekarang Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan.

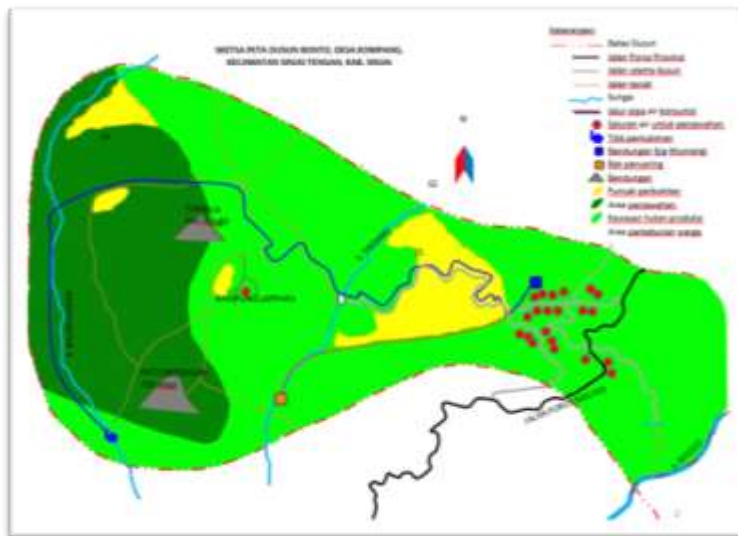
⁶ Wawancara dengan *Puang* (dalam bahasa Konjo merupakan panggilan untuk tetua di satu dusun ataupun kampung) Sayuti Hajarang, pada 8 Oktober 2015.

⁷ Sekarang Kampung Lappara' sebelah barat dari pusat pemukiman dusun Bonto.

Dusun Bonto sebagai Lokasi Gerilyawan NII/TII

Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan berada dalam kondisi tidak stabil. Kisruh politik yang terjadi di Sulawesi Selatan salah satunya adalah pemberontakan yang di pimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar⁸. Pemberontakan yang dilakukan secara berkelompok (gerombolan) dan bergerilya⁹ serta tinggal bersama-sama di satu tempat untuk menghindari dari serangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu tempat yang dipilih oleh segerombolan pemberontak yang dipimpin oleh Qahhar Mudzakkar adalah dusun Bonto. Dusun Bonto (lihat Gambar 3) menjadi salah satu tempat atau markasnya pasukan gerilya. Warga setempat dan pasukan Qahhar Mudzakkar biasa menyebutnya *gurilla*, yang berarti gerombolan (Salim & Ni'am 2012, hal. 23). Gerilyawan bersembunyi di satu tempat penting bagi masyarakat Dusun Bonto, *Pattontongan* (berarti jendela) namanya. Pattontongan dijadikan sebagai tempat persembunyian gerilyawan dari pencarian tentara, karena lokasi ini cukup memadai untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian.

Gambar 3. Sketsa Peta Dusun Bonto



Sumber: (Tim Peneliti Payo-payo 2015)

Pattontongan merupakan gunung tertinggi di wilayah dusun Bonto dan wilayah berupa hutan. Dari Pattontongan inilah gerilyawan bisa melihat datangnya tentara. Dan diyakini sebagai tempat yang paling aman untuk bersembunyi. Bahkan dari Pattontongan bisa melihat seluruh wilayah Kabupaten Sinjai¹⁰. Setelah Belanda menyerahkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada

⁸ Terdapat Perbedaan penulisan nama Qahhar Mudzakkar dalam working paper ini didasarkan pada rujukan yang penulis gunakan (Aqamuz 2007, Awwas 2015 dan Dijk 1995). Ada juga yang menuliskannya dengan nama Abdul Kahar Muzakkar (Asia Report 2005, Aning S 2005).

⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerilya adalah cara berperang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang (biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba).

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Dusun Bonto Sultan Alwy pada 15 Oktober 2015.

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan hasil dari perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Hasil dari KMB salah satunya adalah serah terima kedaulatan pemerintahan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), kecuali Papua Barat. Kemudian dibentuklah RIS yang terdiri dari 16 negara bagian (Suryawan 2013). Untuk itu, pemerintahan Soekarno menertibkan struktur pemerintahan dengan mengadakan reorganisasi anggota untuk Angkatan Darat (AD).

Hasil dari perjanjian KMB pun menuai banyak ketidaksetujuan anak bangsa. Hal ini terjadi, karena tuntutan agar Irian Barat diserahkan oleh Belanda dan masuk ke dalam bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu kelompok yang bergerak untuk pembebasan Irian Barat adalah Qahhar Mudzakar¹¹ (Dijk 1995, hal. 162), yang juga merupakan pemimpin dari pasukan Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS). Qahhar Mudzakar mengusulkan kepada pemerintah pusat agar laskar pejuang dari Sulawesi Selatan menjadi Brigade/Divisi Hasanuddin. Namun, karena adanya intervensi dari *Koninklijk Nederlands Indisch Leger* (KNIL/Tentara Kolonial Hindia Belanda) usulan Qahhar Mudzakar tidak ditanggapi (Aqamuz 2007). Padahal, Qahhar Mudzakar dijanjikan akan diangkat menjadi komandan militer wilayah Sulawesi Selatan (Divisi Hasanuddin), namun kemudian tidak terwujud bahkan ditolak oleh Markas Besar Angkatan Darat (AD) (Sirimorok, Batiran, & Sanusi 2014, hal. 16), dan pasukan KNIL menjadi barisan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Sejak saat itu, Tentara Nasional didominasi oleh KNIL dan tidak sepeham dengan KGSS dan akibatnya terjadi pergolakan diantara kedua kubu tersebut (Aqamuz 2007). Qahhar Mudzakar pun, diangkat menjadi komandan Persiapan Tentara Republik Indonesia (TRI) di Sulawesi. Pasukan ini digabung dengan Brigade XVI. Namun, meskipun ia menjadi komandan, pada akhirnya ia hanya dijadikan sebagai bawahan oleh J.F Marouw (berasal dari Manado) dan Letkol. Lembong (berasal dari Minahasa). Keduanya merupakan bekas anggota KNIL (Awwas 2015, hal. 269).

Hal lain yang membuat Qahhar Mudzakar kecewa terhadap pemerintahan Soekarno adalah diberlakukannya paham Nasional-Agama-Komunis (NASAKOM)¹². Ia tidak mau mengikuti ideologi komunis, ia menginginkan negara Indonesia berjalan berdasarkan syari'ah Islam dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Qahhar Mudzakar adalah salah satu tokoh dari banyak pihak yang berharap pada Soekarno agar mengawal Indonesia menjadi sebuah negara berdasarkan Islam (Aqamuz, 2007). Dalam catatan sejarah Qahhar Mudzakar merupakan seorang pemimpin yang berjuang untuk perbaikan nasib bawahannya, meskipun harus meninggalkan jabatan (Jo' 2010, hal. 89). Meskipun ia menjadi pimpinan TRI, namun keberadaannya hanya dimanfaatkan dan selalu dicurigai oleh Tentara. Karena itu, ia pun rela melepaskan jabatannya sebagai Tentara Republik Indonesia (TRI) dan memilih untuk berjuang di jalur lain.

¹¹ Ia pemuda yang lahir di Desa Lanipa, Palopo pada 21 Maret 1921. Ia adalah pemuda tangguh asal Sulawesi Selatan dan ikut terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia (Dijk 1995, hal. 143).

¹² Paham NASAKOM adalah azas tritunggal (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang diperkenalkan oleh Soekarno. Namun, tritunggal kemudian lebih dikenal dan sangat melekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Roosa 2008). Atas dasar inilah Qahhar Mudzakar menolak NASAKOM yang dikeluarkan oleh Soekarno.

Karena kekecewaan ini pula, akhirnya Qahhar Mudzakkar bergabung dengan NII dibawah pimpinan Kartosoewirjo¹³. Setelah bergabung dengan Kartosoewirjo, ia ditawarkan untuk menjadi Pemimpin Negara Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia (NI/TII). Ia pun ditetapkan sebagai Panglima TII Divisi IV Hasanuddin, meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat (Awwas 2015, hal. 269-270). Pasukan gerilyawan melakukan pemberontakan dengan menguasai hampir seluruh pegunungan di Sulawesi Selatan (Sirimorok, Batiran, & Sanusi 2014, hal. 16). Gerilyawan melanjutkan pemberontakan di pedalaman Bunthain, Bulukumba, Sinjai, Pare-pare, Sengkang, Palopo dan Watahsopeng (Dijk 1995, hal. 155).

TNI pun tidak tinggal diam dengan adanya pemberontakan di wilayah Sulawesi Selatan. Peperangan diantara keduanya pun tidak bisa dihindarkan. Berdasarkan keterangan warga, bahwa dahulu ketika ia masih muda (antara tahun 1950 - 1965) hampir setiap hari ia menyaksikan peperangan antara *gurilla* dengan tentara. Pada saat itu, tidak ada orang yang berani keluar dari rumah jika sedang terjadi aksi saling tembak diantara keduanya¹⁴. Perlawanan yang dipimpin oleh Qahhar Mudzakkar merupakan perlawanan terpanjang dalam catatan sejarah TNI di Sulawesi.

Perubahan Sistem Pemerintahan Lokal

Persetujuan kedua kelompok tersebut pun membawa perubahan politik di desa-desa, termasuk di Desa Kompang. Pemerintahan Soekarno mengubah sistem swapraja menjadi swatantra, yaitu perubahan sistem administrasi pemerintahan yang mulanya berdasarkan pemerintahan sendiri di setiap daerah (Swapraja) yang merupakan peninggalan masa pemerintahan Hindia-Belanda menjadi pemerintahan yang masuk ke dalam sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia. Dalam UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah¹⁵ disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah dengan beberapa tingkatan menurut fungsi administratifnya, yang diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik yang sebelumnya adalah wilayah swapraja maupun bukan akan menjadi daerah Swatantra (pasal 2). Sementara beberapa daerah swapraja menjadi Daerah Istimewa). Implikasinya, setiap wilayah di Indonesia pengaturan dan sistem pemerintahannya akan merujuk kepada peraturan tersebut.

Dalam hal penggunaan istilah lokal dalam sistem pemerintahan di tingkat desa ataupun dusun. Peraturan tersebut mengisyaratkan penyeragaman seluruh istilah dengan menggunakan istilah dalam sistem politik pemerintahan Jawa. Bahasa lokal diubah secara otomatis, misalnya istilah *Gella* diganti menjadi desa, *Puang Gella'* menjadi Kepala Desa, *Sariang* menjadi Dusun dan *Puang Sari* menjadi Kepala

¹³ Kartosoewirjo adalah seorang pengorganisir dan mempunyai banyak pengikut di kalangan masyarakat pedesaan. Ia merupakan pemimpin dari gerakan Darul Islam. Ia lahir di Cepu (antara Blora dan Bojonegoro) pada 1905. Ia mempunyai cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (Dijk 1995, hal. 11).

¹⁴ Wawancara dengan Puang Sayuti Hajarang, pada 8 Oktober 2015.

¹⁵ UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dalam Bab II Pembagian Wilayah Republik Indonesia dalam Daerah Swatantra dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu Daerah Tingkat I (Kotapraja Jakarta Raya), Daerah Tingkat II (Kotapraja) dan Daerah Tingkat III.

Dusun (Salim & Ni'am 2012, hal. 28). Berdasarkan penuturan Kepala Desa Kompang yang menjabat saat ini, Ansar, desa Kompang merupakan desa induk.¹⁶ Pembentukan desa Kompang bersamaan dengan pembentukan Daerah Tingkat II, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi pada Bab I Pasal 1 (ayat 37)¹⁷ dan Pasal 2 (ayat 1) nomor 21¹⁸.

Pada 1961, Kepala Desa pertama setelah diberlakukannya kebijakan baru tersebut adalah Pak Husen. Karena desa Kompang pernah menjadi markasnya Qahhar Mudzakkar yang menginginkan berdirinya Negara Islam, maka dalam versi pemerintahan Qahhar Mudzakkar yang diakui menjadi Kepala Desa tahun 1961 tersebut adalah Puang Sahibe (Salim & Ni'am 2012). Saat itu adalah masa-masa akhir keberhantaran kelompok gerilyawan Qahhar Mudzakkar bersembunyi di desa Kompang, sebelum akhirnya berhasil ditumpas oleh TNI tahun 1962 melalui serangkaian operasi militer ke pelosok-pelosok wilayah Sulawesi Selatan. Semenjak saat itu, wilayah desa Kompang dapat diduduki oleh TNI (Dijk 1995, hal. 157), yang kemudian dimulainya upaya penataan kampung.

Pak Husen hanya menjabat selama 1 tahun sebelum digantikan oleh Pak Takadir untuk periode 4 tahun (1962-1966) (Salim & Ni'am 2012, hal. 28). Pada era Pak Takadir lah penataan kampung sangat intensif dilakukan. Sepeninggal *gurilla*, penataan kampung dilakukan secara sepihak oleh TNI. Pemukiman warga Dusun Bonto dipindahkan dari Pattontongan, (saat ini dikenal sebagai Kampung Lappara') ke tempat yang sekarang menjadi tempat tinggal mereka, yaitu di dusun Bonto. Prosesnya bersamaan dengan aksi penumpasan *gurilla*. Tentara membakar rumah-rumah warga dan memaksa pindah ke tempat tinggal yang baru, yang lokasinya rentan terkena bencana longsor karena berada di lereng-lereng curam dengan kemiringan 30-70 derajat (Sirimorok, Batiran, & Sanusi 2014, hal. 3 dan 11).

Setelah kepemimpinan Pak Takadir, yang hanya menjabat selama 4 tahun, kepala desa selanjutnya berganti sebagaimana layaknya pergantian kepala desa di era pemerintahan Orde Baru. Pak Baharudin adalah kepala desa terlama masa jabatannya, selama 21 tahun sejak 1987-2008, juga Pak Hodde selama 15 tahun (1966-1981), selebihnya antara 1 sampai 5 tahun (lihat Tabel 1).

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Kompang, Ansar, pada 29 September 2015.

¹⁷ Berbunyi wilayah dari bekas daerah-daerah atau bagian dari bekas-bekas daerah yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dalam keputusan ad I-B sub a nomor 1 sampai dengan 20, seperti diperinci lebih lanjut di bawah ini bagian dari Sulawesi Tenggara tersebut, yang meliputi onderafdeling Kolaka dimaksud dalam Bijblad N0. 14377 ad VI sub 5, dibentuk sebagai daerah-daerah Swatantra tingkat *2546 II/Kotapraja dengan nama-nama sebagai berikut Daerah Tingkat II Sinjai.

¹⁸ Berbunyi tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah Tingkat II termaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut Daerah tingkat II Sinjai di Sinjai.

Tabel 1. Daftar Nama Kepala Desa di Desa Kompang, Tahun 1961 – 2008

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Husen	1961-1962 (1 tahun)
2.	Takadir	1962-1966 (4 tahun)
3	Hodde	1966-1981 (15 tahun)
4	Kamil	1981-1982 (1 tahun)
5	Petta Tobo	1982-1987 (5 tahun)
6	Baharudin	1987-2008 (21 tahun)
7	Ansar	2008-2015 (7 tahun), dan 2015-sekarang

Sumber: (Salim & Ni'am 2012, hal. 28)

Topografi Wilayah

Di kabupaten Sinjai terdapat 6 tempat yang dikategorikan sebagai wilayah yang rawan bencana longsor. Secara geografis wilayah-wilayah tersebut termasuk ke dalam zona 'kerentanan tanah tinggi'¹⁹, yang luasnya mencapai 1.352 ha (atau 1,6% dari total luas kabupaten). Wilayah-wilayah tersebut adalah Tompobullu, Bontokatute, Bijinangka, Gunung Perak, Pattongko dan Kompang (Suleman, Imran, & Zubair 2014, hal. 16-17). Desa yang termasuk pada wilayah gerakan tanah kelas tinggi tersebar di beberapa kecamatan. Di kecamatan Sinjai Tengah, yaitu di Desa Bonto²⁰, Desa Kompang (termasuk Dusun Bonto), Desa Pattongko, Desa Kanrung dan Desa Saotanre²¹.

Bencana besar terakhir terjadi pada 20 Juni 2006, yaitu bencana longsor yang menimpa warga Desa Kompang dan Desa Gantarang. Korban meninggal berjumlah 19 orang, selebihnya warga luka-luka, 40 rumah rusak berat dan 50 ha sawah tertimbun tanah serta kerugian ekonomi akibat rusaknya tanaman di kebun-kebun warga (Sirimorok, Batiran, & Sanusi 2014, hal. 3). Faktor penyebab longsor salah satunya adalah gerakan tanah di tebing jalan dan aliran sungai yang hulunya terdapat di bawah badan jalan, sehingga menimbulkan gerakan tanah mudah meluncur ke cabang-cabang sungai. Tidak

¹⁹ Zona kerentanan tanah tinggi adalah untuk daerah yang rawan terjadinya gerakan tanah. Gerakan tanah dapat terjadi secara tiba-tiba pada wilayah bekas longsor akibat curah hujan yang tinggi. Namun, bukan hanya akibat curah hujan, hal lain yang membuat kerentanan adalah faktor eksternal, yaitu perubahan tata guna lahan. Vegetasi pada zona ini umumnya berupa hutan, ladang, pesawahan dan pemukiman dengan kemiringan 15 derajat (Kadarsetia 2011).

²⁰ Bonto yang termasuk ke dalam gerakan tanah kelas tinggi di sini adalah salah satu desa di kecamatan Sinjai Tengah. Sedangkan, Bonto yang menjadi topik dalam tulisan ini merupakan salah satu dusun yang terdapat di desa Kompang.

²¹ Kondisi lerengnya >45% dengan geologi batuan vulkanik (Suleman, Imran, & Zubair 2014, hal. 16-17).

hanya bencana longsor yang terjadi, tetapi banjir bandang pun menerjang wilayah Kabupaten Sinjai (Suleman, Imran, & Zubair 2014, hal. 16-17). Selain lereng yang curam, kondisi curah hujan yang tinggi di 5 wilayah ini berkisar 2.500 mm/tahun, yang menjadi faktor lain penyebab mudahnya terkena bencana longsor (Suleman, Imran, & Zubair 2014, hal. 16-17). Namun, warga meyakini bahwa penyebab yang memperparah terjadinya bencana longsor adalah vegetasi baru yang tumbuh di dekat tempat tinggal mereka, yaitu pinus (Sirimorok, Batiran, & Sanusi 2014, hal. 4). Pergerakan pinus melalui akar pertumbuhan vegetatif yang berpengaruh terhadap stabilitas, struktur, porositas tanah, dan *evapotranspirasi* yang mengakibatkan kandungan air dalam tanah berkurang (Irfan F 2014). Sementara, aparat pemerintahan Kabupaten Sinjai yang menuduh warga sebagai penyebab bencana longsor tahun 2006. Warga dituduh telah melakukan pengrusakan dan penggundulan hutan (Sirimorok, Batiran, & Sanusi 2014, hal. 3).

Pasca bencana tahun 2006, warga mendapatkan bantuan untuk pembangunan Bendungan Ere Munrangi. Bendungan ini memanfaatkan aliran sungai Balassangan, yang mengalir dari wilayah Sinjai Barat ke utara Desa Kompang. Dalam bahasa Konjo, *ere* artinya air dan *munrangi* artinya tergenang (air yang tidak diketahui kemana arah mengalirnya). Proyek ini diharapkan akan meminimalisir terjadinya bencana dan untuk menanggulangi masalah kekurangan air warga sekitarnya. Pembangunan mulai dilaksanakan pada tahun 2008-2009 (Tim Peneliti Payo-payo 2015). Didahului dengan pendataan pada tahun 2007, khususnya data tentang penerima manfaat air dari Bendungan tersebut (Lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Pemakai Bendungan Ere Munrangi, Tahun 2007

Pemakai	Jumlah Pemakai (jiwa)
Desa Kompang	700
Desa Pattongko	3.000
Desa Saotengnga	2.975
TOTAL	6.675

Sumber: (Tim Peneliti Payo-payo 2015)

Memasuki era pemerintahan kepala Desa Pak Ansar, Bendungan Ere Munrangi selesai dibangun dari program pipa CARE. Air dari bendungan tersebut digunakan warga untuk kebutuhan rumah tangga, seperti memasak, minum dan MCK. Bendungan dengan panjang 7 meter dan dalam 1,5 meter ini mengalir ke dusun Bonto (desa Kompang), Desa Pattongko dan Desa Saotengnga. Di Desa Kompang penerima air bendungan Ere Munrangi hanya untuk warga Dusun Bonto, sedangkan Dusun Tombolo dan Dusun Barugae tidak mendapatkan bagian. Di Desa Pattongko penerimanya adalah Dusun Sompung, sebagian Dusun Manubbu dan Kampung Baru. Sedangkan, Desa Saotengnga dipakai untuk seluruh warga desa²². Debit air pada bendungan Ere Munrangi 5,16 liter/detik atau sama dengan 445.824 liter/detik. Berdasarkan pendataan tahun 2007, air yang berasal dari bendungan tersebut mampu memenuhi kebutuhan air warga sebanyak 66,7 liter/orang/hari. Artinya, air dari bendungan tidak mencukupi untuk

²² Wawancara dengan Hasyir (pengelola awal yang ditunjuk untuk mengurus pembangunan Bendungan Ere Munrangi) pada 16 November 2015.

kebutuhan rumah tangga warga di Dusun Bonto, Desa Pattongko dan Desa Saotengnga dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di 3 desa tersebut (Tim Peneliti Payo-payo 2015).

Kependudukan

Penduduk asli dusun Bonto, Desa Kompang merupakan asli orang Sinjai. Namun, ada pula pendatang yang datang ke dusun Bonto yang berasal dari Jeneponto dan Bulukumba. Pendatang merupakan laki-laki atau perempuan yang menikah dengan penduduk desa Kompang. Sedangkan, penduduk dusun Bonto yang pergi merantau ke luar Sinjai, biasa pergi ke Makassar menjadi pedagang, ke Poso (Sulawesi Tengah), Sulawesi Tenggara, dan Bone (Sulawesi Selatan) menjadi buruh bangunan, serta ada juga yang ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh kelapa sawit. Pola migrasi warga biasanya ketika masa sudah habis musim panen cengkeh²³.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk desa Kompang dari tahun 2009-2014 tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Data yang tersedia (lihat Tabel 3) memperlihatkan bahwa ada pengurangan jumlah penduduk antara tahun 2009 dan 2011, dan antara tahun 2013-2014. Kecenderungan yang sama juga terjadi di tingkat kecamatan. Konsentrasi penduduk desa Kompang juga bukan merupakan konsentrasi penduduk terbanyak di kecamatan Sinjai Tengah, hanya antara 7,3% hingga 8,3% saja dari keseluruhan total jumlah penduduk kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak ada di desa Pattongko, yaitu antara 13-15% pada tahun 2009-2014 (BPS 2010; 2012; 2013; 2014).

Tabel 3. Data Kependudukan Desa Kompang, Tahun 2009-2014

No.	Data	Tahun				
		2009	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.152	2.071	2.071	2.073	2.030
2	% terhadap populasi kecamatan	7,96%	7,90%	8,24%	7,48%	7,38%
3	Laju Pertumbuhan Penduduk Desa		-0,04	0	0,001	-0,02
4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan		-0,03	-0,04	0,01	-0,01

Sumber: diolah dari (BPS 2010; 2012; 2013; 2014).

Dusun Bonto merupakan dusun dengan jumlah penduduk terbanyak apabila dibandingkan dengan dusun Tombolo dan dusun Barugae (lihat Tabel 4). Pada tahun 2015, penduduk dusun Bonto berjumlah 758 jiwa atau sebanyak 41% dari seluruh penduduk desa, otomatis, kecenderungan yang sama juga terjadi pada jumlah keluarga, dimana dusun Bonto juga memiliki jumlah terbesar, yaitu 48% atau hampir setengah dari keluarga di desa Kompang berada di dusun Bonto. Berbeda dengan komposisi penduduk di dua dusun lainnya, di dusun Bonto lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 46% dan 34%.

²³ Wawancara dengan Kepala Dusun Bonto, Sultan Alwy, pada 15 Oktober 2015.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Kompang Tahun 2015

No	Dusun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa)	
				Laki-Laki	Perempuan
1	Tombolo	555 [30%]	142 [26%]	266 [33,2%]	289 [28%]
2	Bonto	758 [41%]	259 [48%]	275 [34,3%]	483 [46%]
3	Barugae	530 [29%]	140 [26%]	260 [32,4%]	270 [26%]
	TOTAL	1.843	541	801	1.042

Sumber: (Laporan Jumlah Penduduk Desa Kompang 2015)

Bahasa

Adapun bahasa yang digunakan oleh warga dusun Bonto dan sebagian besar warga desa Kompang adalah bahasa *Konjo*. Sangat sedikit warga yang mampu bertutur dengan bahasa selain bahasa Konjo, menurut Asikin Dg. Pella (Kepala Dusun Barugae), hanya ada sekitar lima keluarga saja di Dusun Bonto yang bertutur dengan bahasa Bugis²⁴. Namun tidak demikian di dua dusun lainnya, di Dusun Tombolo misalnya, perbandingan penutur bahasa Bugis dan Konjo sekitar 50:50, dan di Dusun Barugae sekitar 30% yang mampu berbahasa Bugis. Dari catatan perjalanan seorang peneliti desa, Nurhady Sirimorok dalam tulisannya *Catatan Perjalanan tentang Satu Bahasa*, ia menyimpulkan setelah melakukan perjalanan belasan tahun (tahun 1999-2010) di desa-desa Sulawesi Selatan, bahasa *Konjo* menyebar ke sembilan kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Gowa, Sinjai, Bone dan Barru. Ia memperkirakan bahasa Konjo menyebar di dataran tinggi Sulawesi Selatan (2013).

Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk desa Kompang bermata pencaharian sebagai petani, baik itu pertanian bahan makanan (padi dan jagung) ataupun sebagai petani perkebunan (cengkeh, kakao dan pala). Mereka adalah petani subsisten, yang hasil panennya tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi oleh keluarganya sendiri, khususnya mereka yang menanam padi dan jagung. Sedangkan petani perkebunan, terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu pemilik lahan dan buruh tani (buruh petik cengkeh). Mata pencaharian lainnya peternak sapi dan kambing. Jika dijumlahkan, berdasarkan data tahun 2010 dan 2014 (lihat Tabel 5), kedua mata pencaharian tersebut mencapai lebih dari 70%, dengan komposisi penduduk yang bermatapencaharian sebagai pekerja perkebunan lebih besar dibandingkan yang bekerja di pertanian bahan pangan, yaitu sekitar 40% dan 30%. Pada tahun 2014, pekerja di perkebunan mengalami kenaikan sebanyak 1% dan sebaliknya yang bekerja di pertanian bahan pangan. Kenaikan juga terjadi di sektor perdagangan dan mereka yang bekerja sebagai PNS, sementara mereka yang bermatapencahari-

²⁴ Wawancara dengan Asikin Dg. Pella (Kepala Dusun Barugae), pada 17 Oktober 2015.

an sebagai peternak dan industri sedikit menurun di tahun 2014. Jumlah ini juga seiring dengan penurunan jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan di desanya, yaitu yang berjumlah 868 di tahun 2010 (BPS, 2010) menjadi hanya 807 di tahun 2014 (BPS 2015).

Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kompang Kec. Sinjai Tengah

No	Keterangan	Mata Pencaharian					
		Pertanian Bahan Ma- kanan	Peter- nakan	Perke- bunan	Perdaga ngan	Industri	PNS
1	Desa Kompang 2010 (Jumlah)	280 [32,3%]	132 [15,2%]	377 [43,4%]	30 [3,5%]	32 [3,7%]	17 [2%]
2	Desa Kompang 2014 (jumlah)	252 [31,2%]	119 [14,7%]	361 [44,7%]	35 [4,3%]	20 [2,5%]	20 [2,5%]
3	% terhadap seluruh keca- matan 2010	8%	5,8%	8,8%	5,8%	7,4%	4,5%
4	% di kecamatan	31,2%	14,7%	44,7%	4,3%	2,5%	2,5%

Sumber: diolah dari (BPS 2010 dan 2015)

Potensi Sumberdaya Alam di Dusun Bonto

Tahun 1950-1975, warga Desa Kompang menanam jagung di lahan-lahan kebunnya yang merupakan makanan pokok warga setempat. Hal ini juga berlaku bagi warga di Desa Gantarang, yang sebelum tahun 2006 merupakan bagian dari Desa Kompang (Salim & Ni'am 2012). Pak Ansar menuturkan bahwa masih jelas dalam ingatannya pada saat itu, bahwa sejauh mata memandang yang terlihat di kebun-kebun warga adalah tanaman jagung. Ia menambahkan bahwa apabila musim kemarau tiba, sesuai dengan cara bertani nenek moyangnya dahulu, kebun jagung yang akan ditanami kembali tidak dicangkul, namun dibakar²⁵. Selain komoditas pertanian untuk tanaman pangan, wilayah ini juga sumber komoditas perkebunan dan hasil hutan. Komoditas kebun utama sejak tahun 1950 adalah kopi, sebelum cengkeh menjadi sumber ekonomi warga hingga saat ini, sementara aren (bahan utama pembuatan gula merah) adalah komoditas hasil hutan yang masih terus bertahan hingga saat ini, meskipun tidak banyak petani yang menanam aren dan mengolahnya menjadi gula merah. Hal ini menggambarkan kondisi alam yang memadai untuk kehidupan ekonomi warga serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pada bagian ini akan diuraikan tentang beberapa komoditas utama warga di Dusun Bonto serta dinamikanya dari tahun ke tahun.

²⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Kompang Ansar, pada 29 September 2015.

Tabel 6. Sejarah Perkembangan Komoditas di Desa Kompang

No.	Komoditas	Tahun								
		<1950	1950-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2005	2006-2010	2011-....
Pertanian										
1	Padi	-	-							00
2	Jagung	-				00	00	00	0	0
Perkebunan										
3	Cengkeh	-	-	-						
4	Kakao	-	-	-	-				00	00
5	Kopi	-								
6	Kemiri	-				00	00	0	0	0
7	Pala	-	-	-	-	-	00	00		
8	Kelapa	-							00	00
Hasil Hutan										
9	Aren									
10	Langsat	-							00	00
11	Manggis	-	-	-	-	-				
12	Rambutan	-							00	00
13	Durian	-					00	00	00	00

Sumber: Focus Group Discussion (FGD) bersama petani di Desa Gantarang, pada 17 Oktober 2015²⁶

Keterangan: - : Sangat banyak, 00: Kurang, 0: Sangat Kurang

Komoditas Pertanian

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat, bahwa komoditas pertanian utama warga Dusun Bonto adalah jagung dan padi. Keduanya sekaligus menjadi bahan makanan pokok warga setempat. Seperti telah diuraikan di atas, jagung pernah menjadi bahan makanan pokok warga setempat, hingga tanaman ini tidak lagi menjadi komoditas utama yang ditanam warga di lahan pertaniannya. Perkembangan tanaman jagung mulai berkurang pada era 1981-1990. Komoditas ini terus menerus berkurang hingga sekarang. Sementara, tanaman padi menggantikan posisi komoditas pertanian sejak era tahun 1961-1970-an.

²⁶ Sejarah komoditas yang ditampilkan didasarkan atas hasil FGD dengan beberapa warga di Desa Gantarang, yang dilakukan oleh peserta Pelatihan Penelitian Desa SRP Payo-Payo. Data ini juga berlaku di Desa Kompang karena memiliki persamaan sejarah komoditas di masing-masing desa. Mengingat Desa Gantarang merupakan desa pecahan dari Desa Kompang.

Berdasarkan penuturan warga, tanaman padi mulai ditanam oleh petani dusun Bonto pada era 1961-1970 dengan hasil panen yang sangat memuaskan. Padi kemudian menggantikan makanan pokok warga sebelumnya, yaitu jagung. Sejak tahun 1961-an hingga sekarang, warga dusun Bonto mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Namun, hasil panen komoditas ini pun mulai berkurang sejak tahun 2011 hingga sekarang. Berdasarkan keterangan dari salah seorang warga dusun Bonto²⁷, bahwa hasil panen padi pada tahun 2015 bisa dikatakan gagal panen. Menurutnya, gagal panen tahun ini disebabkan kurangnya air untuk mengairi sawah padinya pada musim kemarau panjang pada tahun 2015. Pada masa panen sebelumnya, dalam satu kali panen biasanya menghasilkan 4 karung gabah²⁸. Namun, berbeda halnya dengan musim panen tahun 2015, ia hanya mendapatkan 1–2 karung gabah. Ia tidak menjual hasil panen padinya, hasil panen padi dipakai dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tahun berikutnya (sebagai antisipasi apabila panen tahun 2016 kembali gagal panen).

Hal yang sama pun disampaikan oleh warga lain, Anwar²⁹. Menurutnya, hasil panen padi berkurang disebabkan banyaknya serangga³⁰ pada batang padi. Penuturan warga lainnya³¹, panen padi berkurang dengan hasil panen hanya menghasilkan 6-7 karung gabah. Jika sebelumnya panen padi menghasilkan 10 karung gabah. Menurutnya, hasil panen yang berkurang salah satu penyebabnya adalah kurangnya air untuk mengairi sawah padinya. Selain itu, tidak adanya saluran irigasi pun membuatnya semakin kesusahan untuk mengairi sawah.

Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan merupakan tanaman yang ditanam oleh petani dusun Bonto dengan tujuan untuk dijual agar memperoleh keuntungan. Terutama cengkeh, kakao dan pala. Kopi, kelapa dan kemiri dimanfaatkan oleh warga dusun Bonto untuk dikonsumsi sendiri. Pada bagian ini akan jelaskan sejak kapan komoditas perkebunan di dusun Bonto ditanam dan berkembang, hingga hasil panen dari masing-masing komoditas.

Kopi

Berdasarkan tabel sejarah perkembangan komoditas di desa Kompang diatas, komoditas kopi sejak era 1950 hingga sekarang perkembangannya tidak berkurang. Hasil panen kopi tetap stabil, meskipun sebagian besar petani tidak menjual hasil panen kopi. Hasil panen kopi dimanfaatkan warga untuk dikonsumsi sendiri. Dengan alasan, agar tidak harus membeli kopi kemasan dari warung. Kebanyakan warga yang memanen komoditas kopi adalah ibu-ibu. Kopi dijadikan oleh warga sebagai komoditas

²⁷ Wawancara dengan Suryani pada 6 Oktober 2015.

²⁸ 1 karung gabah = 50 kg.

²⁹ Wawancara dengan Anwar pada 9 Oktober 2015.

³⁰ Serangga yang dimaksud adalah kumbang menyerupai kura-kura kecil (hitam dan berbintik orange). Serangga lainnya adalah belalang dan tomcat. Selain itu, adanya serangan babi menjelang panen, tikus, *olo'-olo'* (ulat hijau, memakan batang padi), dan *anango* (walang sangit).

³¹ Wawancara dengan Unding pada 20 Oktober 2015.

sampingan³². Sebagian petani pun menjual hasil panen kopinya untuk dijual kepada warga lain ataupun ke pasar-pasar. Jenis kopi yang ditanam di kebun-kebun warga dusun Bonto beragam, jenis kopi robusta dan kopi arabika.

Biasanya, petani yang menjual kopi adalah petani yang memiliki alat pengolah kopi. Alat yang dimiliki adalah mesin penggilingan kopi sederhana untuk memproduksi bubuk kopi yang siap dikonsumsi. Warga yang membutuhkan kopi, akan datang langsung ke rumah si pemilik mesin penggiling kopi. Warga dapat menikmati kopi ini dengan membelinya seharga Rp. 2.000/liter³³. Kelebihan produksi kopi akan dijual ke pasar, khususnya pasar Gantarang (yang terletak di desa Gantarang). Pasar ini hanya ada setiap hari Selasa dan Jum'at. Selain itu pasar Pattongko (yang terletak di desa Pattongko) pada setiap hari Senin dan Kamis, serta pasar Manimpahoi (yang terletak di desa Saotengnga) setiap hari Minggu dan Rabu³⁴.

Cengkeh

Komoditas baru yang masuk ke desa Kompang adalah cengkeh. Cengkeh masuk pada era 1971-1980, hingga sekarang hasil panen cengkeh terhitung sangat banyak. Meskipun, beberapa petani cengkeh mengeluhkan bahwa pohon cengkehnya tahun ini banyak yang mati, kering dan hasil panennya berkurang, tanaman ini tetap menjadi sumber penghasilan utama warga hingga saat ini. Hampir setiap petani di dusun Bonto memiliki pohon cengkeh, baik itu yang ditanam di pekarangan rumah ataupun di kebun-kebun di sekitar gunung Pattontongan (termasuk di kawasan hutan pinus). Masa awal penanaman cengkeh, petani yang ingin menanam cengkeh membeli benih cengkeh di Kepala Desa Pak Hodde (Salim & Ni'am 2012). Namun, kini tidak semua petani di dusun Bonto membeli benih cengkeh. Sebagian besar petani membudidayakan benih cengkehnya sendiri. Jika pun ingin membeli benih cengkeh kepada petani lain yang biasa menjual benih cengkeh dijual dengan harga Rp 5.000 per satu pohon benih cengkeh.³⁵

Kelapa

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan tanaman kelapa mulai berkembang pada 1950an. Kurun waktu 1950-2005, menurut penuturan warga perkembangannya masih sangat banyak. Sebelum warga mengenal dan biasa membeli minyak kemasan ataupun minyak goreng berbahan kelapa sawit, biasanya sebagian warga di dusun Bonto memanfaatkan kelapa sebagai bahan utama pembuatan minyak kelapa. Memasuki era 2006 hingga sekarang, perkembangan tanaman kelapa mulai berkurang. Warga tidak lagi memanfaatkan kelapa untuk bahan minyak kelapa, kelapa hanya dijadikan oleh warga se-

³² Wawancara dengan Rosmiati pada 14 November 2015.

³³ Wawancara dengan Rosmiati pada 14 November 2015.

³⁴ Wawancara dengan Rosmiati pada 30 September 2015.

³⁵ Wawancara dengan Tajuddin pada 22 Oktober 2015.

bagai pelengkap masakan yang diambil saripatinya (santan). Selain itu, biasanya juga kelapa dijadikan sebagai bahan utama untuk membuat *sarabba*³⁶.

Kakao

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. Tanaman eksotis³⁷ ini pun mulai masuk dan ditanam di desa Kompang sejak tahun 1980an. Tanaman ini pada masa awal masuk dengan mudahnya menggantikan tanaman utama warga desa Kompang, yaitu jagung. Datangnya kakao kemudian membuat cara bercocok tanam petani pun berubah. Jenis kakao yang merupakan tanaman monokultur ini hanya dapat bertahan dan menghasilkan produksi yang sangat banyak hingga tahun 2005. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, dari hasil panen kakao tidak lagi dapat diharapkan. Pohon kakao yang dulu sebagai primadona, kini tampak kering dengan buah yang kering dan busuk. Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) yang terus menyerang kakao merupakan salah satu penyebab hasil produksi kakao semakin menurun. Sehingga, petani pun tidak bisa berbuat banyak. Petani kakao di desa Kompang membiarkan pohon kakaonya tidak terurus.³⁸

Kemiri

Tanaman kebun lainnya yang pernah ditanam di kebun-kebun petani desa Kompang adalah kemiri. Perkembangan komoditas ini mulai tumbuh sejak 1950-1960an dengan hasil panen yang sangat banyak hingga tahun 1980an (lihat Tabel 6). Bersamaan dengan masuknya kakao ke desa Kompang dan kemudian menggantikan tanaman jagung. Tapi kemudian, tidak hanya jagung saja yang keberadaannya digantikan oleh kakao. Pohon-pohon kemiri ditebang dan tebangannya dijadikan sebagai bahan bangunan pembuatan rumah. Alasan petani yang memiliki pohon kemiri menebang pohonnya karena pohon kemiri (pohonnya besar dan tinggi), sehingga menjadi tanaman pelindung untuk pohon kakao³⁹. Sejak tahun 1981-2000, perkembangan tanaman kemiri berkurang dan semakin berkurang sejak 2001 hingga sekarang. Buah kemiri hanya dimanfaatkan untuk bumbu masakan saja. Selebihnya, satu per satu pohon kemiri kini ditebang.

³⁶ Sarabba adalah minuman khas Sulawesi Selatan (Bugis Makassar). Minuman yang menggunakan bahan utama jahe, gula merah, dan santan. Lebih mirip dengan wedang jahe.

³⁷ Disebut eksotis, karena komoditas kakao merupakan komoditas yang berasal dari luar Indonesia. Yaitu Amerika. Namun, kakao menjadi komoditas utama di perkebunan-perkebunan rakyat dan sejak tahun 2002, Indonesia menjadi penyuplai kakao terbesar kedua setelah Pantai Gading. Salah satunya provinsi penyuplai kakao adalah Sulawesi Selatan (Susanti 2014).

³⁸ Wawancara dengan Tajuddin pada 22 Oktober 2015.

³⁹ Wawancara dengan Pak Dahlan pada 1 Oktober 2015.

Pala

Tidak hanya cengkeh dan kakao yang diperkenalkan oleh pemerintah kepada petani di desa Kompang, tanaman baru yang masuk kemudian adalah pala⁴⁰. Tanaman asli Maluku ini mulai berkembang dan tumbuh di desa Kompang pada era 1991-2000. Namun, hasil panen pala pertama tidaklah memuaskan. Masih sedikit petani yang tertarik untuk menanam pala. Hasil yang sama pun terjadi pada tahun 2001-2005. Hasil panen pala masih kurang. Keterbatasan pengetahuan petani dalam membudidayakan tanaman baru pun menjadi salah satu penyebabnya. Hingga tahun 2006, setelah kakao tidak bisa lagi memberikan hasil yang memuaskan, petani kemudian mulai mengalihkan perhatian dan mulai serius untuk menanam dan mengurus pala. Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2006 hingga sekarang perkembangan komoditas pala semakin banyak. Pala sudah direncanakan menggantikan kakao dalam kurun waktu 5 tahun ke depan⁴¹.

Komoditas Hasil Hutan

Komoditas hasil hutan merupakan komoditas yang tumbuh sendiri di areal hutan ataupun yang ditanam dengan sengaja oleh petani di dusun Bonto. Komoditas hasil hutan di dusun Bonto antra lain adalah aren, langsung, manggis, durian, rambutan dan durian.

Aren

Aren merupakan tanaman lokal warga dusun Bonto, jauh sebelum datangnya tanaman eksotis. Aren telah ada di dusun Bonto sejak kurun waktu sebelum tahun 1950. Dari tanaman ini, biasanya warga dusun Bonto memanfaatkannya untuk dijadikan bahan utama pembuatan gula aren. Sejak tahun 1950 hingga sekarang, perkembangan tanaman aren masih sangat banyak, namun sedikit warga yang memanfaatkannya untuk diolah menjadi gula aren (lihat Tabel 6). Hanya beberapa petani aren saja yang memanfaatkannya menjadi gula aren dan menjualnya kepada warga yang lain. Aren merupakan salah satu tanaman yang diyakini oleh warga dapat menyimpan air. Oleh karena, keberadaan pohon aren sangat penting untuk menunjang sumber daya air warga dusun Bonto.⁴²

Langsat

Perkembangan tanaman langsung mulai berkembang sejak 1950-1960 dengan hasil yang sangat banyak hingga tahun 2001-2005. Dan hasil panen langsung mulai berkurang sejak 2006 hingga sekarang (lihat Tabel 6). Langsung hanya dijadikan oleh warga sebagai tanaman sampingan dan warga biasa mememanennya pada bulan April (lihat Tabel 6).

⁴⁰ Dari tanaman pala dapat menghasilkan biji dan bunga yang kemudian dimanfaatkan dalam bumbu masakan (Turner 2011).

⁴¹ Wawancara dengan Pak Ansar pada 3 Oktober 2016.

⁴² Wawancara dengan Puang Sayuti Hajarang pada 21 November 2015.

Manggis

Hasil hutan lainnya di dusun Bonto adalah manggis. Manggis mulai ditanam oleh warga sejak 1991-2000 dengan hasil yang sangat banyak. Warga yang memiliki pohon manggis dengan jumlah banyak, biasa menjual hasil panennya⁴³. Namun, tidak semua warga menanam tanaman manggis. Sama halnya dengan langsung, tanaman ini hanya sebagai tanaman sampingan warga dikala hasil panen cengkeh sudah habis. Manggis biasa dipanen pada bulan April (lihat Tabel 6).

Rambutan

Tahun 1950-1960 awal mula warga tertarik untuk menanam rambutan, dan hasilnya pun sangat banyak hingga tahun 2005. Warga yang tertarik menanam rambutan biasa menanamnya di pekarangan rumah ataupun di kebun-kebun. Namun, hasilnya mulai berkurang sejak tahun 2006 hingga sekarang. Rambutan baru bisa diambil hasilnya pada bulan April.

Durian

Akhir bulan desember, di pekarangan rumah warga yang memiliki pohon durian nampak terlihat bunga-bunga durian mulai bermunculan. Namun, durian baru benar-benar berbuah ketika memasuki bulan Januari dan baru bisa dipanen pada bulan April (lihat Tabel 6). Perkembangan tanaman durian di dusun Bonto adalah sejak 1950-1990 dengan hasil yang sangat banyak. Hasil durian mulai berkurang sejak 1991 hingga sekarang (lihat Tabel 6).

Cengkeh di Dusun Bonto

Bagi warga dusun Bonto, yang dimaksud tanaman lokal adalah tanaman yang pada awalnya menjadi tanaman utama yang ditanam oleh warga, seperti jagung dan aren. Yaitu tanaman yang ditanam diatas lahan kebun warga. Tanaman lokal pun adalah tanaman yang tidak berasal dari luar desa ataupun provinsi Sulawesi Selatan, misalnya cengkeh yang berasal dari Maluku, yang hingga sekarang menjadi komoditas utama yang ditanam oleh petani di dusun Bonto. Tanaman cengkeh dan kakao mulai ada sejak tahun 1970-an dan 1980-an (lihat Tabel 6). Masuknya tanaman luar ke desa Kompang bersamaan dengan masa jabatan Kepala Desa Pak Hodde (1966-1981), yaitu sekitar 1970-1972.

Sejak diperkenalkannya cengkeh, warga dusun Bonto mengelola cengkeh dan menjadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Walaupun demikian, mereka masih tetap menanam tanaman aren, kemiri dan jagung. Pada masa pemerintahan Pak Hodde (Kepala Desa tahun 1966-1981), pemerintah membagikan 4.000 bibit cengkeh untuk ditanam di kebun warga. Masing-

⁴³ Wawancara dengan Erna pada 14 November 2015.

masing keluarga mendapatkan bibit dengan harga Rp 25 – Rp. 250 per bibit⁴⁴ (Salim & Ni'am 2012, hal. 28).

Warga menuturkan bahwa jika warga berminat maka bisa mendapatkan bibit tersebut melalui Pak Hodde⁴⁵. Beberapa petani pun tertarik untuk menanam cengkeh, diantaranya adalah Pak Asikin dan Pak Bahar (EA & dkk 2013, hal. 4 dan 21-22). Namun, pada awalnya, karena keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan tanaman cengkeh ini, hasil panennya tidak memuaskan. Dari 1.000 bibit cengkeh yang ditanam oleh warga, yang berhasil tumbuh hanya 20 pohon dan selebihnya kering dan mati (Salim & Ni'am 2012, hal. 28). Walaupun demikian, karena naiknya popularitas tanaman ini, warga tidak berhenti menanam cengkeh pada masa itu.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi pemasok cengkeh nasional. Kabupaten Sinjai, dimana dusun Bonto berada salah satu wilayah yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan nasional industri yang menggunakan bahan baku cengkeh. Corak produksi yang memungkinkan komoditas ini dikelola dalam skala kecil atau rumah tangga, memungkinkan komoditas ini menjadi andalan setiap keluarga untuk menopang kehidupan sehari-harinya dan masa depan keluarganya. Awal penanaman cengkeh di dusun Bonto bersamaan dengan *booming* nya komoditas ini di pasar domestik dan internasional. Di Indonesia, tahun 1970-an, cengkeh merupakan bahan baku rokok kretek dan menjadi salah satu penyumbang angka pertumbuhan ekonomi negara (EA & dkk 2013, hal. 4 dan 21-22). Karena itu, setelah mengalami kegagalan pada masa awal penanaman, warga tetap mencoba menanam cengkeh kembali pada tahun 1977. Salah seorang pelopor tanaman cengkeh di dusun Bonto, yakni Pak Asikin Pella, memberikan pengetahuannya untuk mengelola tanaman cengkeh kepada warga lainnya di sebagian kebun warga yang masih ditanami aren, kemiri dan jagung (EA & dkk 2013, hal. 4 dan 21-22). Hal ini dimulainya cengkeh sebagai komoditas primadona dan sumber penyangga kehidupan warga Desa Kompang, khususnya dusun Bonto.⁴⁶

Memasuki era 1980-an, cengkeh di dusun Bonto menjadi salah satu penyuplai industri cengkeh nasional. Di tingkat nasional, luas areal tanaman cengkeh di Indonesia mencapai 400 ribu Ha pada tahun 1980 dan terus meningkat rata-rata sebesar 0,35% pertahun hingga tahun 1997 (Siagian V. J. 2014, hal. 9). Tidak mengherankan jika warga Dusun Bonto pun kemudian menyandarkan sumber ekonominya kepada tanaman cengkeh yang ditanamnya hingga saat ini. Meskipun demikian, pada tahun 1980 juga merupakan awal titik balik meruginya petani cengkeh termasuk di Dusun Bonto. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 8 tahun 1980 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri, petani dimanapun tidak bisa menentukan harga jual cengkehnya sendiri.

⁴⁴ Bergantung pada kondisi bibit yang tersedia, jika sudah tumbuh daunnya, harganya semakin mahal.

⁴⁵ Wawancara dengan Puang Sayuti Hajarang , pada 8 Oktober 2015.

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Kompang Ansar, pada 29 September 2015.

Kebijakan itu mengatur bahwa harga ditentukan oleh pihak pemegang otoritas yaitu Menteri Perdagangan dan Koperasi⁴⁷. Sekaligus mengatur kepada siapa petani bisa menjual cengkehnya, yaitu Koperasi Unit Desa yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut. Warga menyebutnya sebagai “*hongji gaya baru*”. Akibatnya, petani menebang pohon cengkehnya atau membiarkannya tidak terurus (EA & dkk 2013, hal. 4), seperti yang terjadi disekeliling petani cengkeh di desa Kompang. Pada saat itu harga cengkeh Rp 250 per kilogram⁴⁸. Alasan, warga membiarkan cengkehnya tidak terurus adalah pengaruh karakter tanaman cengkeh dan hasil produksi cengkeh yang sangat dipengaruhi oleh pengaruh iklim pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, setelah terjadi panen raya yang hasilnya sangat memuaskan, maka pada tahun berikutnya hasil panen cengkeh kurang memuaskan. Karena itu perlu proses pemeliharaan tanaman cengkeh selama 2 tahun dengan perawatan yang baik sebelum mendapatkan hasil yang baik lagi (Litbang Pertanian).

Memasuki era tahun 1990-an, tata niaga cengkeh semakin diperketat pengaturannya oleh pemerintah. Tahun 1992, pemerintah mendirikan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC)⁴⁹, yang bertujuan untuk stabilisasi harga cengkeh di tingkat petani⁵⁰. Pada saat yang sama juga menetapkan 10 provinsi pemasok utama cengkeh⁵¹ untuk pabrik rokok agar mengkonversi tanaman cengkeh dengan tanaman lain. Ke-10 provinsi tersebut adalah Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Lampung, Jawa Barat (termasuk Banten), Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara (Gorontalo) dan Maluku (Litbang Deptan 2007, hal. 4). Sementara, skema penjualan hasil cengkeh masih menerapkan kebijakan tahun 1980 yang diperbarui tahun 1992 (Keppres RI No.20 tahun 1992) yaitu hanya dapat ditampung oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang ditentukan dengan harga dasar yang ditetapkan oleh Presiden. Kemudian KUD menjual cengkeh petani kepada BPPC sebelum sampai ke pabrik rokok kretek⁵². Dengan rantai distribusi hasil panen yang panjang tersebut menyebabkan harga

⁴⁷ Isi Keppres No. 8 tahun 1980 terdiri dari 6 poin, yaitu: (1) sebagai upaya perlindungan bagi petani, maka pembelian cengkeh langsung dari petani hanya boleh dilakukan oleh KUD yang telah diseleksi, (2) untuk menjaga kelangsungan pengadaan dan kemantapan harga cengkeh, maka hasil produksi cengkeh dalam negeri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri rokok kretek, (3) harga dasar cengkeh dari petani yang belum diatur dalam keputusan ini kemudian akan diatur oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi setelah mendapat persetujuan Presiden, (5) semua ketentuan yang bertentangan dengan Keppres ini dinyatakan tidak berlaku, dan (6) keppres ini berlaku sejak 15 Januari 1980.

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Kompang, Pak Ansar, pada 29 September 2015.

⁴⁹ BPPC ditunjuk sebagai pelaksana tata niaga cengkeh dengan anggotanya terdiri dari KUD, PT. Kerta Niaga (BUMN), dan PT. Kembang Cengkeh Nasional (BUMD).

⁵⁰ Tujuan dibentuk BPPC untuk menjaga kestabilan harga cengkeh ditingkat petani, melalui pembelian, penyanggaan, pergudangan cengkeh hasil produksi dalam negeri melalui KUD dan penjualan cengkeh kepada pengguna. Harga cengkeh dari petani oleh KUD sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 4 tahun 1996 yaitu Rp 8.000 per kilogram (Rp 5.000 untuk penerimaan tunai petani, Rp 2.000 dana penyertaan modal Tata Niaga Cengkeh dan Rp 1.000 untuk dana konversi tanaman cengkeh yang dikelola BPPC).

⁵¹ Tahun 1995, produksi cengkeh nasional mencapai 90.007 ton (Siagian V. J. 2014, hal. 1-2).

⁵² Penjualannya dikenakan Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) dengan harga Rp 150 per kilogram, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 313/MPP/KEP/9/1997 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh.

jual di tingkat petani terus menurun dan tidak pasti. Sejak tahun 1996, produksi cengkeh di Indonesia mengalami penurunan, karena petani cengkeh menjadi malas untuk terus mengembangkan dan memelihara cengkehnya, hingga banyak tanaman cengkeh diserang hama penyakit, seperti Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (BPKC), Cacar Daun Cengkeh (CDC), Gugur Daun Cengkeh (GDC) dan penggerek batang cengkeh.

Walaupun demikian, areal tanam cengkeh di Indonesia tidak berkurang, khususnya areal yang dikelola oleh rakyat. Sangat sedikit komoditas ini yang dikelola oleh perkebunan besar, baik BUMN maupun swasta. Sejak tahun 1980-an, komoditas ini ditanam oleh rakyat, yaitu lebih dari 90% dari keseluruhan luas tanam cengkeh di Indonesia (lihat Tabel 7 dibawah). Rata-rata peningkatan luas areal per tahun adalah 0,47% (Siagian V. J. 2014, hal. 9)

Tabel 7. Perkembangan Luas Areal Tanaman Cengkeh di Indonesia berdasarkan Status Pengusahaan

Tahun	Persentase Luas		
	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Negara	Perkebunan Swasta
1980-1997	97,00	0,66	2,34
1998-2013	98,07	0,42	1,42

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, diolah Pusdatin dalam (Siagian V. J. 2014, hal. 9-10)

Era Reformasi adalah era kejatuhan rejim monopoli komoditas cengkeh. Hal ini ditandai dengan ditiadakannya BPPC dan seluruh turunan kebijakannya. Dampaknya adalah peningkatan luas areal sejak tahun 1998 serta peningkatan harga jual petani. Pada saat yang sama juga, permintaan atas komoditas ini meningkat yaitu untuk memenuhi kebutuhan industri kretek (Siagian V. J. 2014, hal. 9-10). Sejak saat itu, harga komoditas cengkeh ditentukan oleh harga pasar, sehingga fluktuasi harga kerap terjadi di masa-masa tahun 2000-an, namun nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa rejim BPPC (lihat Grafik 1).

Grafik 1. Perkembangan Harga Cengkeh, 1983-2012



Sumber: (Siagian V. J. 2014, hal. 20)

Berdasarkan data produksi cengkeh Perkebunan Rakyat tahun 2009-2013, terdapat 8 provinsi di Indonesia yang menjadi sentra produksi cengkeh. Dari ke 8 provinsi itu, salah satunya adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan provinsi penghasil cengkeh dengan rata-rata produksi 11.990 ton per tahun (13,51%) dari total keseluruhan cengkeh di Indonesia (Siagian V. J. 2014). Tahun 2011, cengkeh⁵³ yang ditanam warga dusun Bonto tidak berbuah. Ini disebabkan karena musim hujan yang berlangsung lama, sehingga buah cengkeh yang baru berbunga gugur dan tidak berbuaholeh turunya hujan yang berlangsung lama.

Pada tahun 2013, kabupaten di Sulawesi Selatan dengan hasil produksi cengkeh terbesar adalah Kabupaten Luwu hasil produksi 9,62 ribu ton (55,10%). Selain Kabupaten Luwu, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Wajo. Kabupaten Bone dengan hasil produksi cengkeh sebesar 1,81 ribu ton (10,37%), Kabupaten Sinjai 1,70 ribu ton (9,70%) dan Kabupaten Wajo 1,48 ribu ton (8,46%). Sedangkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan hasil produksinya sebesar 16,37% (Siagian V. J., 2014). Musim panen cengkeh tahun 2015 (lihat Tabel 8), harga cengkeh ditingkat petani harganya naik turun. Di dusun Bonto, desa Kompang pada tahun 2015⁵⁴ (sejak bulan September – November) harga cengkeh kering mencapai Rp 90.000-120.000 per kilogram, cengkeh basah Rp 35.000-42.000 per kilogram dan tangkai cengkeh Rp 5.000 per kilogram.⁵⁵

⁵³ Tahun 2012, harga cengkeh Rp 57.577 per kilogram (Siagian V. J. 2014). Tahun 2012 dan 2013, 95,5% pemasukan cukai dihasilkan dari industri kretek dari seluruh pemasukan cukai yang masuk ke kas negara senilai Rp 87 triliun (EA & dkk 2013, hal. 4).

⁵⁴ Tahun 2015, produktivitas kakao di Sulawesi Selatan menurun 734 kg/ha/tahun (Kompas 2016).

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Bakrin pada 14 Oktober 2015 dan hasil wawancara dengan Pak Tajuddin pada 22 Oktober 2015.

Tabel 8. Kalender Musim Kegiatan Dusun Bonto

KEGIATAN PER BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Angin												
Angin kencang												
Angin disertai hujan												
Hujan sedang												
Hujan lebat												
Kemarau												
Tanam padi												
Panen padi												
Tanam cengkeh												
Panen cengkeh												
Pemupukan cengkeh												
Panen kakao												
Tanam jagung												
Panen jagung												
Panen kopi												
Panen buah-buahan												
Panen sayur-sayuran												
Gergaji kayu												
Kerja keluar desa												

Sumber: Forum Group Discussion (FGD) dengan beberapa orang tokoh di dusun Bonto, yaitu Kepala Dusun Bonto Sultan Alwy, Reniswari Sultan, Tajuddin, Nirma, Rosmiati, Harlina dan Hj. Boddi, pada 18 November 2015.

Keterangan:

1. Pada bulan September merupakan puncak musim kemarau.
2. Pada bulan September dan Oktober merupakan puncak panen cengkeh. Pada bulan November hasil panen cengkeh mulai berkurang.
3. Pemupukan cengkeh dilakukan setelah musim hujan turun.
4. Panen sayur-sayuran tergantung tanam sayuran pada bulan berapa, namun kebanyakan di dusun Bonto panen sayuran jatuh pada bulan Oktober dan November.
5. Kegiatan gergaji kayu biasa dilakukan untuk pembangunan rumah.
6. Setelah panen cengkeh selesai, beberapa warga dusun Bonto pergi keluar desa untuk bekerja di Makassar dan Bone (kerja bangunan).

Dari tabel di atas dapat dilihat, musim panen cengkeh di dusun Bonto adalah pada bulan ke 7-11 (Juli-November). Sebelumnya bulan ke 3 pohon cengkeh mulai berbuah. Bulan September dan Oktober merupakan puncak panen cengkeh. Bulan November hasil panen cengkeh mulai berkurang. Selain

cengkeh (tanaman jangka panjang), dari hasil FGD (Tabel 8) dengan warga Dusun Bonto, hasil panen tanaman lainnya adalah padi, kakao, jagung, kopi, buah-buahan (manggis, langsung, durian dan rambutan) dan sayur-sayuran (kangkung, sawi, buncis, kacang panjang). Namun, tanaman jangka pendek ini hanya dijadikan tanaman sampingan setelah habis masa panen cengkeh.

Kakao di Dusun Bonto

Pada tahun 2002, Indonesia menjadi produsen kakao kedua dunia setelah Pantai Gading. Dan pada tahun 2003, posisi Indonesia bergeser menjadi produsen kakao ketiga dunia setelah Ghana (Susanti 2014). Salah satu provinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia adalah Sulawesi Selatan. Kakao merupakan salah satu komoditas yang memegang peranan penting bagi pasar Sulawesi Selatan, karena kakao merupakan komoditas ekspor kedua setelah hasil tambang. Salah satu desa di Kabupaten Sinjai yang menghasilkan kakao adalah desa Kompang, terutama di dusun Bonto. Perubahan ekologi dan tata guna lahan secara besar-besaran yang terjadi pada tahun 1980 kemudian membawa kakao masuk ke dusun Bonto.

Areal tanaman kakao di Indonesia sebagian besar dikelola oleh rakyat. Dan sisanya dikelola oleh perkebunan, baik perkebunan milik negara ataupun perkebunan milik swasta. Sejak tahun 1980-2013, luas areal tanaman kakao di Indonesia meningkat, dengan rata-rata mencapai angka 13,29% (lihat Tabel 9).

Tabel 9. Perkembangan Luas Areal Tanaman Kakao di Indonesia berdasarkan Status Pengusahaan

Tahun	Persentase Luas		
	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta
1980-1997	68,46	15,41	16,13
1998-2013	91,66	4,03	4,31

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, diolah Pusdatin dalam (Susanti 2014)

Berdasarkan penuturan Pak Ansar, keberadaan Kakao juga menyebabkan semakin berkurangnya tanaman komoditas pertanian. Hal ini karena penggunaan bahan kimia (pestisida) secara berlebihan sebagai upaya untuk menyemprot hama yang menyerang pohon kakao⁵⁶, yang berdampak terhadap lahan pertanian di sekitarnya. Masuknya kakao hingga ke pelosok-pelosok desa di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari adanya Proyek Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE) yang berkepentingan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengekspor non-migas dan sebagai langkah antisipasi menurunnya produksi dari hasil ekspor minyak dan gas bumi. Kebijakan ini termasuk memasifkan penanaman kakao di Indonesia selain kelapa sawit dan karet (Tim Peneliti Industri Kakao Indonesia 2008).

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Kompang Ansar, pada 29 September 2015.

Sehingga, pada era ini, dengan perubahan pola bercocok tanam petani Indonesia yang diarahkan salah satunya untuk menanam kakao membuat luasan tanaman kakao di Indonesia mencapai 37 ribu Ha (Susanti 2014).

Kebijakan ini berdampak pada perubahan penggunaan lahan di Desa Kompang. Hampir seluruh kebun-kebun warga di desa Kompang digantikan dengan kakao. Berdasarkan hasil penelitian Nurhady Sirimorok, dkk (2014) dengan peralihan tata guna lahan menjadi kebun kakao sesungguhnya sumber-sumber kehidupan warga terancam. Selain itu, petani juga menjadi ketergantungan terhadap kakao, karena setelah cengkeh, kakao-lah yang menjadi sumber penghasilan utama petani di dusun Bonto. Menurutnya, dengan adanya kakao telah menurunkan peluang kerja di desa. Selain juga semakin besarnya uang yang harus dikeluarkan untuk mengakses barang dan jasa dari kota ke desa karena industri kakao tersebut.

Hingga tahun 1998, kakao kemudian menjadi sumber utama penghasilan petani di dusun Bonto selain dari hasil panen cengkeh. Di tahun yang sama bersamaan dengan krisis moneter, harga kakao pun mencapai puncaknya. Harganya mencapai Rp 50.000 per kilogram (Pedoman Koran 2015). Tetapi, masa kejayaan kakao tidak berlangsung lama. Sejak tahun 2006, hasil produksi kakao di dusun Bonto dan hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan mulai berkurang (lihat Tabel 10). Ini terjadi karena kakao mulai diserang hama Penggerek Buah Kakao (PBK), penyakit *Vascular Streak Dieback* (VCD), menurunnya tingkat produktivitas, kualitas biji kakao rendah⁵⁷ dan umur pohon kakao yang sudah tua sejak ditanam tahun 1980-an.

⁵⁷ Dilakukan studi mutu biji kakao Sulawesi Selatan, kakao biji yang disampling secara acak diambil dari daerah penghasil kakao: Kabupaten Polmas, Majene, Pinrang, Bone, Sinjai, Wajo dan Bulukumba. Hasilnya adalah 85,7% biji kakao tidak memenuhi syarat umum SNI dan apabila ditinjau dari spesifikasi persyaratan mutu, biji kakao mengandung kadar lemak 47,94%-54,73% dan mempunyai kadar kulit tinggi (Ramlah & Suprapti 2005). Mutu biji kakao yang rendah berimbas pada pemotongan harga ekspor kakao. Kandungan lemak dipengaruhi oleh jenis tanaman kakao yang dibudidayakan dan ketinggian tempat. Kadar lemak biji kakao yang ditanam di ketinggian 800-1.000 mdpl sekitar 56%, dan ketinggian 45 meter hanya 47%. Mutu biji kakao dipengaruhi juga oleh keadaan per-tanaman dan iklim.

Tabel 10. Hasil Produksi Kakao di Sulawesi Selatan

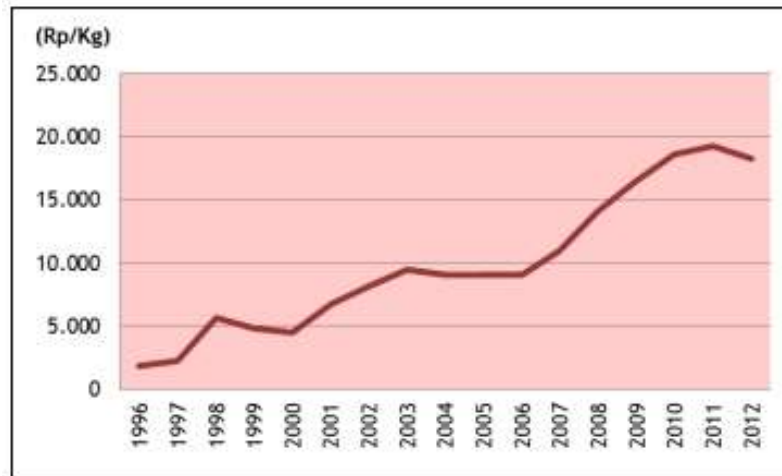
Tahun	Hasil Produksi (ton)
2004	153.122
2005	149.345
2006	144.533
2007	119.293
2008	112.037
2009	164.444
2010	173.755
2011	142.910

Sumber: Statistik Perkebunan Tahun 2011, dalam (Siagian J. 2013, hal. 17)

Tahun 2009, pemerintah berupaya mengatasi penurunan tingkat produksi dan sebagai upaya untuk keberlanjutan kakao nasional, maka pemerintah kemudian mempunyai ide untuk menjalankan program Gerakan Nasional Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS) (Komisi Usaha Pengawas Persaingan 2009). Munculnya program GERNAS bertujuan untuk peremajaan tanaman pada kakao yang sudah tua, rusak, dan peningkatan produksi. GERNAS kakao dilaksanakan di 9 provinsi dan 40 kabupaten di Indonesia (Siagian J. 2013, hal. 14-17 dan 34-35). Pada tabel di atas, pada tahun 2009 produksi kakao di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Bisa diindikasikan bahwa program GERNAS bisa dikatakan berhasil. Akan tetapi, pemerintah sendiri sampai saat ini belum bisa menentukan harga kakao. Padahal kakao merupakan komoditas ekspor terbesar setelah sawit. Harga kakao⁵⁸ masih ditentukan oleh pasar internasional (lihat Grafik 2).

⁵⁸ Tahun 2012, Bursa Berjangka Jakarta (JFX) harga kakao menjadi Rp 22.190 per gram (Rp 22.190 per kilogram). Turunnya harga kakao dipengaruhi oleh peningkatan produksi kakao di kawasan Afrika. September 2012, ekspor biji kakao 21.024,56 metrik ton. Periode Januari-Juni 2016, harga kakao Rp 17.000 per kilogram, September Rp 20.000 per kilogram. Januari-September, ekspor biji kakao mencapai 105.000 ton (33,54%) (Kompas 2012).

Grafik 2. Perkembangan Harga Kakao di Tingkat Produsen di Indonesia, 1996-2012



Sumber: (Siagian J. 2013)

Hutan, Hutan Pinus dan Perlawanan Rakyat untuk Penghidupan

Politik Kebijakan Kehutanan di Sulawesi Selatan

Sebagian wilayah dusun Bonto, desa Kompang masuk ke dalam penunjukan kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai. Luasan wilayah yang ditunjuk menjadi kawasan hutan 460 ha dari luas keseluruhan desa 1.457 ha (Sirimorok, Batiran, & Sanusi 2014). Dalam referensi lain, luas kawasan hutan lindung di desa Kompang adalah 600 ha dan hutan produksi 500 ha (Ngakan, Achmad, Wiliam, Lahae, & Tako 2005; Wahid, Bohari, & Achmad 2015). Berdasarkan Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai 2012-2023, Pasal 38 ayat 2 menyatakan bahwa “kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Sinjai terdapat di 4 wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo, dengan luas total 7.193,20 ha”. Berdasarkan penuturan Pak Ansar, kawasan hutan yang kini menjadi hutan negara, dulunya adalah hutan asli milik masyarakat. Warga senantiasa menggantungkan hidup dengan apa yang mereka tanam di hutan itu.⁵⁹ Status hutan tersebut, hingga saat ini masih dalam proses penunjukan, belum kepada tahap penetapan apalagi pengukuhan kawasan hutan.⁶⁰

Pengaturan kawasan hutan di Indonesia, khususnya sejak era pemerintahan Orde Baru, diatur secara terpusat. Di Sulawesi Selatan, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kabupaten ke Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Kompang Ansar, pada 29 September 2015

⁶⁰ Terdapat beberapa tahapan untuk menetapkan status kawasan hutan di Indonesia, dimulai dari tahap penunjukan, penataan batas kawasan hutan, diikuti dengan tahapan penetapan dan diakhiri dengan pengukuhan. Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.50/Menhut-11/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Timur yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1)⁶¹ bahwa pemerintah kabupaten akan melaksanakan urusan kehutanan, tetapi tugas koordinasi dan pengawasan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Kebijakan ini diperkuat dengan peraturan yang dikeluarkan tahun 1998, yaitu PP No. 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah⁶².

Berdasarkan peraturan tahun 1968 tersebut, tahun 1981 kebijakan penutupan kawasan hutan di desa Kompang mulai diterapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai. Dengan mulai membatasi akses warga untuk menanam dan mengambil hasil panen di wilayah yang termasuk kawasan hutan. Kegiatan warga di dalam hutan dikategorikan sebagai aktivitas merusak kawasan hutan, dan diancam dengan ancaman dipenjarakan. Setelah dikeluarkannya kebijakan penutupan kawasan hutan, setahun kemudian kawasan tersebut dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung, dengan dikeluarkannya SK Menteri Pertanian No. 760/kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan, yang didalamnya disebutkan bahwa ada sekitar 3,6 juta Ha lahan di Sulawesi Selatan yang ditunjuk menjadi kawasan hutan. Namun, hal ini tidak mengubah persepsi warga tentang keberadaan hutan tersebut, bahkan hingga sekarang, dimana dianggap sebagai hutan produksi yang hasilnya bisa dimanfaatkan warga untuk menghidupi ekonomi keluarganya.

Kebijakan tahun 1982 tersebut kemudian diperbaharui pada tahun 1999 dengan penjelasan tentang luasan wilayah hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Didalam SK Menteri Pertanian dan Kehutanan No 890/kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dinyatakan bahwa kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang luasnya 3.879.771 ha (lebih luas dibandingkan kebijakan sebelumnya yang hanya 3,6 juta Ha). Rinciannya adalah untuk penunjukkan sebagai kawasan suaka alam⁶³, kawasan pelestarian alam⁶⁴, taman buru

⁶¹ Yang menyatakan bahwa: “Pemangkuan hutan, ...dst, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I, ...dst, terkecuali untuk wilayah bekas NIT, dimana urusan kehutanan telah ada pada Daerah Swatantra Tingkat II”.

⁶² Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I adalah: (a) pengelolaan taman hutan raya, dan (b) penataan batas hutan. Adapun urusan di bidang kehutanan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah: (a) penghijauan dan konservasi tanah dan air, (b) persuteraan alam, (c) perlebahan, (d) pengelolaan hutan milik/hutan rakyat, (e) pengelolaan hutan lindung, (f) penyuluhan kehutanan, (g) pengelolaan hasil hutan non kayu, (h) perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal-areal buru, (i) perlindungan hutan, dan (j) pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.

⁶³ Dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian dalam peraturan pemerintah ini adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik daratan ataupun perairan dengan fungsi pokoknya sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman ekosistemnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat di areal kawasan tersebut. Selain itu, penetapan kawasan suaka alam terdiri dari kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa.

⁶⁴ Sedangkan kawasan pelestarian alam terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya dan kawasan taman wisata alam.

(darat dan perairan) seluas 789.066 Ha, untuk hutan lindung⁶⁵ seluas 1.944.416 Ha, untuk hutan produksi terbatas⁶⁶ seluas 855.730 Ha, untuk hutan produksi tetap seluas 188.486 Ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 102.073 Ha (Dinas Kehutanan Sulsel 2012). Penunjukkan kawasan-kawasan tersebut meliputi tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh warga setempat termasuk warga Dusun Bonto di desa Kompang. Namun, pada kebijakan yang dikeluarkan tahun 2009⁶⁷, kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan berkurang menjadi hanya 2,7 juta Ha⁶⁸, atau berkurang sekitar 1 juta Ha. Apakah hal ini merupakan respon dari penolakan warga yang terjadi pada tahun 1984 atau bukan, akan dapat dilihat langsung kenyataannya di lokasi, yaitu di Dusun Bonto, apakah mereka kemudian bisa mengakses wilayah kebunnya yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan atau tetap dilarang.

Dengan adanya kebijakan ini, tanah yang mulanya dikuasai oleh warga desa Kompang, baik tanah yang bersertifikat maupun tidak menjadi bagian dari kawasan hutan negara. Sehingga, Pada masa awal kebijakan ini diberlakukan, kebun-kebun warga yang sudah ditanami kopi, cengkeh dan kakao tidak bisa diakses termasuk tidak bisa diambil hasilnya. Tetapi warga tidak tinggal diam, beberapa warga nekat untuk mengambil haknya dengan melintasi batas kawasan hutan tersebut untuk mengambil hasil kebunnya. Tindakan ini berakibat pada proses hukum yang harus dihadapi warga, bahkan beberapa warga dipenjara (Sirimorok, Batiran, & Sanusi 2014, hal. 12). Atas kejadian tersebut, warga melakukan advokasi dengan melakukan negosiasi, yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa dengan Dinas Kehutanan setempat untuk mengizinkan warga mengambil hasil atas tanaman yang sebelumnya mereka tanam di kebunnya⁶⁹. Walaupun demikian, kebijakan penunjukan hutan dan penutupan lahan ini tetap membuat warga tidak bisa kembali ke tempat tinggal asal mereka.

Kebijakan kehutanan tahun 1980-an dan diikuti tahun 1999 merupakan rantai kesulitan warga mengakses hutan yang sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Kebijakan penghijauan dan reboisasi hutan tahun 1976 juga menjadi tonggak dimana warga mulai sulit mengakses kawasan hutan. Inpres Nomor 8 tahun 1976 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang merupakan bantuan langsung dari pemerintah yang dananya berasal dari APBN (tahun anggaran 1976/1977). Kebijakan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, termasuk pengadaan bibit dan penanamannya. Ke-

⁶⁵ UU No. 41 Tahun 1999 dalam Pasal 1 (huruf h) hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian kawasan hutan lindung. Ini pun diterapkan di hutan dusun Bonto. Lagi-lagi warga tidak bisa mengakses kawasan hutan.

⁶⁶ Dan ayat 2, hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukan gunaproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

⁶⁷ SK Menteri Kehutanan RI No. 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

⁶⁸ Dengan rincian kawasan suka alam/kawasan pelestarian alam (851.267 ha), hutan lindung (1.232.683 ha), hutan produksi terbatas (494.846 ha), hutan produksi tetap (124.024 ha) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (22.976 ha).

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Kompang Ansar, pada 29 September 2015.

bijakan ini dimaksudkan untuk melakukan penanaman kembali atau meremajakan pohon-pohon serta jenis tanaman lain di hutan negara dan di areal lain berdasarkan rencana tata guna tanah untuk hutan⁷⁰ yang dilaksanakan di atas lahan seluas kurang lebih 312.500 Ha⁷¹.

Program reboisasi ini diperkuat lagi pada tahun 1980 dan 1993, khususnya tentang bagaimana mengatur pendanaan untuk merealisasikan program ini. Dalam Keppres No. 35 Tahun 1980 tentang Dana Reboisasi, terdapat ketentuan tentang keharusan pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) skala besar untuk membiayai kegiatan rehabilitasi lahan hutan dan regenerasi areal konsesi pasca tebang. Dengan ketentuan ini, setiap perusahaan pemegang konsesi wajib menyerahkan dana jaminan reboisasi⁷² yang ditujukan untuk menjaga dan terus menambah kualitas serta kuantitas pohon di hutan. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan ini tidak dilaksanakan sebagaimana tujuan dari diadakannya peraturan ini, seringkali terdengar bahwa terdapat penyalahgunaan dana reboisasi yang terkumpul (Down To Earth 2002, hal. 18,19 dan 29)⁷³. Untuk itu, pada tahun 1993, berdasarkan Keppres No. 40/1993, pengaturannya lebih diperketat, dimana tarif dana reboisasi ditentukan secara terpusat dan berbeda di setiap wilayah di kawasan Indonesia.⁷⁴

Hutan Pinus di Dusun Bonto dan Lahan Pertanian Rakyat

Kondisi wilayah, khususnya topografi Kabupaten Sinjai merupakan kawasan daratan landai dengan kemiringan 0-45%. Sekitar lebih dari 30%-nya merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan di atas 40% (Irfan F 2014). Begitu juga kondisi di dusun Bonto, dalam rangka penanaman pohon di hutan, Dinas Kehutanan, pada tahun 1984 memilih benih pinus untuk ditanam di kawasan hutan di wilayah Dusun Bonto. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan penghijauan yang sudah dicanangkan sejak tahun 1976. Secara teknis, pemilihan tanaman pinus didasarkan pada

⁷⁰ Pasal 2 Inpres No. 8/1976

⁷¹ Pasal 4 Inpres No. 8/1976 merinci kegiatan-kegiatan penanaman di atas lahan seluas 300.000 Ha, reboisasi seluas 100.000 Ha dan untuk proses pengadaan bibit di atas lahan seluas 2.500 Ha.

⁷² Besar dana jaminan reboisasi dan permudaan iuran areal HPH: US\$.4 (empat dollar Amerika) untuk setiap meter kubik kayu semua jenis yang diproduksi dan US\$.0,50 (lima puluh sen dolar Amerika) untuk setiap meter kubik chipwood yang diproduksi. Dana jaminan ini digunakan untuk meningkatkan nilai kualitas dan kuantitas tegakan hutan pasca tebang di dalam areal HPH. (Pasal 3 Keppres No. 35/1980).

⁷³ Dana reboisasi diserobot oleh perusahaan-perusahaan beserta koleganya. Seperti PT. Inhutani yang menguasai hutan dalam jumlah besar di luar Jawa (Sulawesi Selatan). Dana ini digunakan untuk pengrusakan hutan (penyediaan dana pembuatan kayu insdustri).

⁷⁴ Pasal 1 (1) Keppres No. 40/1993, yaitu “Mengubah ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Keppres No. 29/1990 yang telah diubah dengan Keppres No. 28/1991, khususnya Pasal 7 tentang tarrif dana reboisasi untuk masing-masing wilayah di Indonesia berbeda-beda dan bergantung pada jenis hutannya, yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Kehutanan. Di pasal tersebut juga diatur tentang ketentuan pelaku reboisasi untuk melunasi biaya yang harus dibayarkan untuk kegiatan reboisasi dengan mekanisme tertentu yang diatur oleh Menteri Kehutanan. Selain itu juga diatur tentang sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran.

kemudahan proses penanamannya⁷⁵, sehingga akan mudah tertanam tanpa perawatan lebih lanjut dan akan segera memenuhi target penghijauan kembali hutan khususnya di kawasan ini (Tim Peneliti Payo-payo 2015). Sejak saat itu, kawasan hutan pinus di Desa Kompang pun semakin meluas. Terdapat di 3 lokasi⁷⁶, yaitu di Laiyya dengan lahan seluas 84 Ha, yang saat ini umur pohonnya mencapai 21 tahun, dengan jumlah 35.200 pohon. Kemudian di Kp. Baru dengan total luas lahannya 100 Ha, yang umurnya mencapai 21 tahun sejumlah 40.000 pohon, serta di Buluparingi diatas lahan seluas 164 Ha yang umurnya lebih muda, yaitu 15 tahun, berjumlah 32.000 pohon (Irfan F 2014).

Warga menganggap bahwa kehadiran hutan pinus telah sedikit demi sedikit menghilangkan suplai air di desanya. Hal ini ditandai dengan hilangnya sumber mata air dan debit air sungai yang semakin sedikit dari tahun ke tahun. Pak Hasyir menuturkan bahwa ketika ia berusia 10 tahun (yaitu sekitar tahun 1961), ia masih bisa menangkap kepiting di sungai kecil yang ada di dusun Bonto⁷⁷. Namun, ketika ia menginjak usia dewasa, ketika pohon pinus mulai ditanam, ia sulit mendapatkan kepiting di sungai. Pada saat itu, hutan pinus sudah tumbuh besar. Sehingga, ia menyimpulkan bahwa pinus telah mengambil persediaan air di dusunnya. Berdasarkan penuturan warga lainnya, sebelum ada pinus, air di dusun Bonto sangatlah melimpah.⁷⁸

⁷⁵ Jenis pinus yang ditanam adalah *Pinus Merkusii Jung et de Vriese* (Pinus Merkusii). Pinus merkusii merupakan jenis pinus yang tumbuh alami di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera (Aceh, Tapanuli, dan Kerinci). Ciri khas dari pohon pinus merkusii adalah pohonnya besar, batang lurus, berbentuk silinder, kulit luarnya kasar, tegakkan dewasa mencapai 45 m dengan diameter 140 cm. Usia pohon pinus yang tumbuh di kawasan hutan dusun Bonto sekitar 31 tahun dan yang paling muda 9 tahun. Bahkan, setelah terjadi bencana longsor tahun 2006, tumbuh beberapa pohon pinus baru di beberapa titik. Padahal, sebelumnya tidak ditanami pinus. Ciri lain pinus merkusii adalah penyebaran biji yang mudah diterbangkan oleh angin, benih pinus mudah didapat dengan jumlah yang banyak, laju pertumbuhannya cepat, serta dapat tumbuh pada lahan-lahan kritis.

⁷⁶ Lihat kembali Gambar 2 untuk melihat posisi lokasi hutan Pinus di Desa Kompang.

⁷⁷ Wawancara dengan Pak Hasyir pada 16 November 2015

⁷⁸ Mengenai keyakinan warga bahwa pinus telah mengambil air mereka berdasarkan hasil penelitian Tim Kompang (Pelatihan Penelitian Desa Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo tahun 2015) bahwa keberadaan hutan pinus di dusun Bonto tidaklah layak. Karena pinus dapat mengurangi kandungan air tanah melalui proses intersepsi, evapotranspirasi dan air limpasan (*runoff*). Bentuk tajuk pohon pinus conifer, membuat intersepsinya lebih besar dibandingkan vegetasi lain. Sistem perakaran tunggang dan daya rambah 2,25 meter (1,5 kali dari tinggi pohon). Selain itu, serasah yang terbentuk akibat adanya tegakan pinus mengakibatkan air limpasan lebih besar daripada kemampuan menyerap ke dalam tanah. pada bulan Oktober 2015, kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Sinjai, salah satunya kebakaran yang terjadi di area perbatasan Kecamatan Sinjai Barat dengan Kecamatan Sinjai Tengah. Kebakaran terjadi di kawasan hutan pinus (hutan produksi) dengan total area kebakaran 1,6 ha. Salah satu penyebab kebakaran adalah puntung rokok kemudian merembet ke pangkal batang pinus (Tim Payo-payo, 2015). Sisi lain pinus adalah mudahnya serasah pinus terbakar. Pinus pun dapat tumbuh dengan baik pada wilayah dengan curah hujan 2.309 mm/tahun, sedangkan pada wilayah dengan curah hujan dibawah 1.500 mm/tahun lebih baik tidak ditanami pinus. Menurut Stasiun Meteorologi No. 420 Bikeru, curah hujan Kabupaten Sinjai adalah 1.097 mm/tahun. Sehingga, diyakini penyebab longsor tahun 2006 salah satunya adalah karena adanya keberadaan hutan pinus (alih fungsi hutan) (Tim Peneliti Payo-payo 2015).

Di sisi lain, keberadaan pinus di kawasan hutan negara merupakan upaya pemanfaatan sumberdaya alam dengan cara mengundang investor. Setelah pinus besar dan cukup umur untuk dimanfaatkan hasilnya, pemerintah daerah mengundang investor untuk dijadikan sumber pemasukan daerah. Pemerintah kabupaten Sinjai bekerja sama dengan PT. Rakindo untuk melakukan penjualan getah pinus yang disadap oleh petani. Tahun 2007, ketika warga mulai melakukan penyadapan getah pinus, harga getah pinus saat itu hanya Rp 1.500 per kilogram dan harga yang dianggap terlalu murah ini membuat warga kemudian tidak tertarik lagi untuk menyadap pinus. PT. Rakindo kemudian menaikkan harga pembelian getah pinus menjadi Rp 2.000 per kilogram (Salim & Ni'am 2012, hal. 36-37). Getah pinus tersebut adalah hasil produksi getah pohon pinus yang ditanam di kawasan hutan lindung. Hal tersebut disampaikan oleh Andi Sainal (anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dapil Dua) yang menyatakan bahwa hutan pinus atau pohon pinus di Sinjai ini sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Berdasarkan keterangan lain dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, bahwa hutan lindung yang ditanami pohon pinus merupakan hutan lindung yang diproduksi (Irfan F 2014).

Untuk mencapai target pemasukan daerah, pemerintah daerah menargetkan volume getah per tahunnya. Hal ini direalisasikan dengan Perjanjian Kerjasama Sadapan Getah Pinus No. 800/138/Disbunhut I 2007 antara Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dengan PT. Rakindo Utama Makmur, untuk mencapai target untuk melakukan penyadapan getah pinus sebanyak 1.000 ton/tahun. Hal ini yang diduga menjadi faktor alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi, terlebih volume target per tahunnya belum memenuhi, yaitu hanya 800 ton/tahun.

Secara teknis, lahan di kabupaten Sinjai, khususnya di Dusun Bonto, tidak cocok untuk ditanami tanaman Pinus. Hal ini juga sudah diatur dalam kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan tahun 2009⁷⁹. Untuk tujuan pengelolaan lingkungan hidup, maka hutan lindung dengan lereng kemiringan 45 derajat, seharusnya di tanami dengan pohon atau kayu berjenis endemik, contohnya, kemiri, rotan, enau, damar, dan lain-lain. Namun, kebijakan tahun 2009 ini tidak diindahkan oleh pihak pemerintah kabupaten Sinjai⁸⁰. Padahal, seperti telah diketahui bahwa lereng kemiringan wilayah dusun Bonto ialah 45 derajat. Akibatnya tahun 2011, di Kabupaten Sinjai hampir 100% hutan lindung sudah dikonversi menjadi hutan produksi. Hal ini didukung oleh munculnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai mengenai pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi. Perda yang dikeluarkan oleh Bupati Sinjai ini bertentangan dengan moratorium alih fungsi lahan hutan berdasarkan keputusan kementerian di tingkat pusat⁸¹ serta RTRW kabupaten Sinjai 2012-2023⁸².

⁷⁹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸⁰ Berdasarkan data Dinas Kehutanan tahun 2009, luas lahan hutan pinus di Kabupaten Sinjai mencapai 3.155 Ha dengan jumlah pohon 1.009.200 pohon (Irfan F 2014).

⁸¹ Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 jo surat Menhut No. 1712/Menhut-VII/2001 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Departemen Kehutanan tidak lagi mengeluarkan ijin alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan pelepasan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan budidaya pertanian/perkebunan (dalam Irfan F 2014).

⁸² Perda No. 28/2012 tentang RTRW Kabupaten Sinjai 2012.

Penolakan Warga Terhadap Kehadiran Hutan Pinus

Tahun 1984, ditengah-tengah gencarnya penanaman pinus, terjadi penolakan yang dilakukan sejumlah warga Dusun Bonto. Warga pada saat itu berhasil menghentikan penanaman pinus di kawasan hutan di Dusun Bonto. Hal ini menunjukkan bahwa warga tidak diam ketika sebagian wilayahnya ditunjuk menjadi kawasan hutan, terlebih dalam proses penunjukan kawasan hutan yang ada disekitarnya tidak melibatkan warga. Penolakan warga didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, kawasan yang kini menjadi kawasan hutan negara merupakan sumber penghasilan warga, karena di dalam kawasan tersebut terdapat kebun-kebun warga. Kedua, di kawasan hutan merupakan tempat bersejarah bagi warga dusun Bonto, karena disanalah tempat asal nenek moyangnya yaitu wilayah Pattontongan dan Kampung Lappara' (lihat Peta 2). Pattontongan dianggap sebagai wilayah asal muasal nenek moyang mereka, sedangkan Kampung Lappara' adalah pemukiman pertama warga dusun Bonto sebelum dipindahkan secara paksa oleh tentara (usai penumpasan pemberontakan gerilyawan yang dipimpin Qahhar Mudzakar) ke tempat tinggal sekarang di tepi-tepi lereng curam.

Gerakan penolakan warga dipimpin oleh tokoh agama salah satu tarekat di dusun Bonto, yaitu Puang Suyuti. Berdasarkan penuturannya, ia mengerahkan para pemuda dusun untuk melawan petugas dari Dinas Kehutanan yang sedang melakukan proses penanaman pinus di wilayah mereka. Dengan alasan kultural untuk mempertahankan Kampung Lappara' dan Pattontongan, mereka berupaya untuk menghadang kehadiran hutan pinus. Bahkan, hingga saat ini di Kampung Lappara masih banyak warga yang bermukim di sana (sekitar 27 rumah)⁸³ (Tim Peneliti Payo-payo 2015). Untuk itu mereka menolak penunjukkan kawasan hutan yang diterbitkan tahun 1982. Walaupun demikian, aksi ini hanya menghentikan proses penanaman pinus saja, tetapi tidak membatalkan kebijakan penunjukkan kawasan hutan di wilayah Dusun Bonto. Seperti telah diuraikan diatas, kebijakan ini masih terus ada bahkan terus diperbarui sejak tahun 1999 hingga tahun 2009.⁸⁴

Selain penolakan dari warga, upaya terakhir warga adalah agar bisa mengakses kawasan hutan tersebut. Pemerintah desa juga turut memperjuangkan perubahan fungsi status hutan lindung menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKm)⁸⁵ dengan alasan tersebut. Upaya tersebut termasuk pengajuan penggantian tanaman dengan tanaman yang bisa menampung air, untuk mengatasi kelangkaan air yang dialami warga desa dan tanaman jangka panjang yang bisa dijadikan sumber penghasilan bagi kehidupan mereka.

⁸³ Wawancara dengan Puang Sayuti Hajarang pada 22 November 2015

⁸⁴ Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 890/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

⁸⁵ Dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan lain adalah agar masyarakat setempat memiliki kemampuan, kemandirian dalam mendapatkan sumber daya hutan secara optimal demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Pada Pasal 7; kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal HKm dengan ketentuan belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan, pada hutan produksi akan dilakukan pemanfaatan kayu yang mengacu pada peta indikatif arahan pemanfaatan hutan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kesimpulan dan Kajian Selanjutnya

Proses penunjukkan kawasan hutan melalui kebijakan kehutanan di Indonesia merupakan salah satu alat proses perebutan sumber-sumber penghidupan rakyat. Salah satunya di Dusun Bonto, Desa Kompang, Kabupaten Sinjai. Sejak ditetapkannya sebagai kawasan dusun ini pada tahun 1982 (SK Menteri Pertanian No. 760/kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan), sebagian Dusun Bonto berubah menjadi kawasan hutan lindung (seluas 460 ha dari luas 1.457 ha). Secara legal formal, dengan proses penunjukkan kawasan hutan ini, maka warga di sekitarnya tidak bisa mengakses wilayah tersebut, padahal sebelumnya warga sudah menguasai lahan di kawasan tersebut dan mengelolanya untuk menjadi sumber mata pencaharian dengan potensi sumberdaya alam yang sangat kaya. Sejak saat itu, kawasan tersebut ditanami dengan pohon pinus, yaitu *Pinus Merkusii Jung et de Vriese*. Sejumlah ahli telah mengkaji bahwa tanaman pinus adalah tanaman yang dapat merusak kondisi tanah, khususnya apabila di sekitarnya terdapat lahan pertanian dan dekat dengan areal perkampungan. Warga Dusun Bonto pun menuturkan bahwa sumber air menjadi semakin berkurang sejak hutan pinus ada.

Dari pengungkapan fakta-fakta diatas, maka akan sangat menarik untuk melanjutkan kajiannya terkait dengan dinamika masyarakat dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan pangannya di tengah-tengah semakin hilangnya sumber air di lahan pertaniannya karena keberadaan hutan pinus. Berdasarkan data yang tersedia, warga dusun Bonto sangat bergantung pada tanaman padi sejak deka-de 1980-an, sebagai makanan pokok mereka, yang sebelumnya mereka mengkonsumsi jagung yang juga ditanam sendiri di atas lahan pertaniannya. Pada kenyataannya, tanaman padi pun semakin berkurang sejak tahun 2010-an, sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa warga dusun Bonto. Terlepas dari adanya kebijakan revolusi hijau pada saat itu, sebagai tanaman tradisional warga, kedua komoditas tersebut (padi dan jagung) semakin hilang karena kondisi alamnya semakin tidak menunjang, yaitu semakin sedikitnya persediaan air di wilayah tersebut untuk mengairi lahan pertanian mereka. Hal lain yang patut untuk kajian selanjutnya adalah bagaimana politik kehutanan pinus yang sampai saat ini masih tahap penunjukkan itu dapat mengancam sumber-sumber penghidupan warga. Selain memperdalam dinamika tersebut, pertanyaan penting lainnya yang penting dijawab adalah bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh warga untuk beradaptasi dengan lingkungannya, serta bagaimana mereka mengatur keterbatasan lingkungan yang ada dan bagaimana perubahan relasi diantara mereka ditengah keberadaan pinus.

Daftar Rujukan

- Aning S, F. (2005). *100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Yogyakarta: NARASI.
- Aqamuz, E. (2007). *Profil Abdul Qahhar Mudzakkar: Patriot Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Syahid NII/TII*. Ciputat: Yayasan Al-Abrar.
- Asia Report. (2005). *Daur Ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia*. International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worldwide.
- Awwas, I. S. (2015). *Kesaksian Pelaku Sejarah Darul Islam (DI/TII)*. Yogyakarta: Darul Uswah.
- BPS. (2010). *Kecamatan Sinjai Tengah Dalam Angka*. Kabupaten Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai.
- BPS. (2012). *Kecamatan Sinjai Tengah Dalam Angka*. Kabupaten Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai.
- BPS. (2013). *Kecamatan Sinjai Tengah Dalam Angka*. Kabupaten Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai.
- BPS. (2014). *Kecamatan Sinjai Tengah Dalam Angka*. Kabupaten Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai.
- BPS. (2015). *Kecamatan Sinjai Tengah Dalam Angka*. Kabupaten Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai.
- Dijk, C. V. (1995). *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2015).
- Dinas Kehutanan Sulsel. (2012). *Profil Kehutanan Sulawesi Selatan*. diakses pada 17 Desember 2015, dari Prov Sulawesi Selatan: http://sulselprov.go.id/potensi/kehutanan/2012/_PROFIL%20KEHUTANAN%20Sul-Sel.pdf
- EA, P., & dkk. (2013). *Ekspedisi Cengkeh*. Makassar: Inninawa.
- Irfan F, M. (2014). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Alih Fungsi Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi*. Makasar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.
- Jo', K. (2010). *Mengenang Perjuangan Bersama Abdul Qahhar Mudzakkar dan J.W. Gerungan*. La Galigo Multi Media.
- Komisi Usaha Pengawas Persaingan. (2009). *Kajian Industri Perdagangan Kakao*. Komisi Usaha Pengawas Persaingan Usaha.
- Kadarsetia, E. (2011). Zonasi Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Brebes Bagian Selatan, Provinsi Jawa Tengah. *Buletin Vulkanologi dan Bencana Geologi*.
- Kompang, R. D. (2015).
- Kompas. (2012, Oktober 25). *Harga Kakao Turun 4 Persen karena Peningkatan Produksi*. Diakses pada 24 Februari 2016, dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/25/20151854/Harga.Kakao.Turun.4.Persen.karena.Peningkatan.Produksi>
- Kompas. (2016, Januari 22). *Produktivitas Dibenahi?* Diakses pada 24 Februari 2016, dari http://print.kompas.com/baca/2016/01/22/Produktivitas-Dibenahi?utm_source=bacajuga
- (2015). *Laporan Jumlah Penduduk Desa Kompang*.

- Litbang Deptan. (2007). *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Cengkeh Edisi Kedua*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Litbang Pertanian. (n.d.). *Produksi Cengkeh Nasional*. Diakses pada 11 Februari 2016, dari situs Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan: <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=4219>
- Ngakan, P. O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K., & Tako, A. (2005). *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi yang Mandiri*. Bogor: CIFOR.
- Payo-Payo, P. P. (2015). *Pinus di Desa Kompang*. Belum dipublikasikan.
- Payo-payo, S. R. (2013). *Laporan Naratif PFR Kompang dan Gantarang*. Kabupaten Sinjai.
- Pedoman, Koran. (2015, Desember 31). *Gernas Gagal Sejahterakan Petani Perkebunan*. diakses pada 24 Februari 2016, dari <http://koranpedoman.com/2015/12/31/gernas-gagal-sejahterakan-petani-perkebunan/>
- Ramlah, S., & Suprpti. (2005). Studi Mutu Biji Kakao Biji Sulawesi Selatan Pada Tingkat Pedagang Pengumpul Primer Kabupaten. *Majalah KIMIA*.
- Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Salim, I., & Ni'am, L. (2014). *Merancang Bangun Sistem Keselamatan Rakyat: Pengalaman Kelola Bencana di Lima Kabupaten (Maluku Tenggara, Sinjai, Ende, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah)*. Yogyakarta: Insistpress.
- Siagian, J. (2013). *Peranan Program Rehabilitasi Gernas Kakao dalam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*. Makassar: Pascasarjana Program Studi Sistem-Sitem Pertanian (SPP) Universitas Hasanuddin.
- Siagian, V. J. (2014). *Outlook Komoditi Cengkeh*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- Sirimorok, N. (2013, Oktober 1). Catatan Perjalanan tentang Satu Bahasa. *Rubrik Literasi KTM*.
- Sirimorok, N., Batiran, K., & Sanusi, R. (2014). Bermukim di Lereng Maut: Bagaimana Bencana Tercipta di Dua Desa Sulawesi Selatan. *Transformasi Sosial*, 16.
- Suleman, I., Imran, A., & Zubair, H. (2014). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Sebaran Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Mustek Anim*.
- Susanti, A. A. (2014). *Outlook Komoditi Kakao*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Suryawan, A. (2013). Peranan APRIS dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Keutuhan RIS Tahun 1949-1950. *AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah, Volume 1, No. 1, 2*.
- Syari'ati, A. (2015). *Biografi Abdul Kahar Muzakir(1925-1960)*. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Tim Peneliti Industri Kakao Indonesia. (2008). *Program Gerakan Nasional Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS)*. Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Australia Indonesia Partnership (AIP), ASKINDO, SADI, ACIAR dan Penelitian Industri Kakao Indonesia.

Tim Peneliti Payo-payo. (2015). *Pinus di Desa Kompang*. Makasar: Belum dipublikasikan.

Turner, J. (2011). *Sejarah Rempah: Dari Erotisme Sampai Imperialisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Wahid, A. Y., Bohari, N., & Achmad. (2015). Penegakkan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan: Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Hasanuddin Law Review*, 1 (1).

Daftar Peraturan

1. UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
2. UU No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Keppres No. 8 tahun 1980 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri
6. Keppres No. 35 Tahun 1980 tentang Dana Reboisasi
7. Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
8. Keppres No. 40 Tahun 1993 tentang
9. Inpres Nomor 8 tahun 1976 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi
10. Inpres No. 4 tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa Dari Petani Cengkeh
11. PP No. 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kabupaten ke Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur
12. PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
13. PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 313/MPP/KEP/9/1997 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh
15. SK Menteri Pertanian No. 760/kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan
16. SK Menteri Pertanian dan Kehutanan No 890/kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
17. SK Menteri Kehutanan RI No. 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
18. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.50/Menhut-11/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
19. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm)
20. Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 jo surat Menhut No. 1712/Menhut-VII/2001
21. Perda Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Kompang dan Pembentukan Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah
22. Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai 2012-

Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan Informan	Tanggal Wawancara
1.	Sultan Alwy	Kepala Dusun Bonto	15 Oktober 2015
2	Sayuti Hajarang	Puang Dusun Bonto dan merupakan pemimpin dari tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Bonto	8 Oktober 2015 dan 22 November 2015
3	Asikin Dg. Pella	Kepala Dusun Barugae	
4	Ansar	Kepala Desa Kompang	29 September 2015 dan 3 Oktober 2015
5	Ibu Suryani	Salah seorang warga di Dusun Bonto	6 Oktober 2015
6	Anwar	Salah seorang warga di Dusun Bonto	9 Oktober 2016
7	Dahlan	Salah seorang warga di Dusun Bonto	1 Oktober 2015
8	Unding	Ketua RK 07 Kampung Lappara' Dusun Bonto	20 Oktober 2015
9	Bakrin	Salah seorang warga di Dusun Bonto	14 Oktober 2015
10	Tajuddin	Salah seorang warga di Dusun Bonto	22 Oktober 2015
11	Rosmiati	Salah seorang warga di Dusun Bonto	30 September dan 14 November 2015
12	Erna	Salah seorang warga di Dusun Bonto	14 November 2015
13	Pak Hasyir	Salah seorang warga di Dusun Bonto	16 November 2015

Biodata Penulis

Sityi Maesarotul Qori'ah lahir di Garut, Jawa Barat, pada 5 Januari 1992. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan H. Aunaddin Zaenuddin dan Mimin Mintarsih. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis diantaranya SDN Balewangi II, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurulhuda, Madrasah Aliyah (MA) Nurulhuda. Setelah lulus dari MA, penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Sosiologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, lulus tahun 2015. Karya ilmiah yang dihasilkan berjudul "Pengembangan Desa Agropolitan dalam Pembentukan Sistem Perekonomian Masyarakat Pedesaan Kasus di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung" (Skripsi S1). Sejak bulan Mei tahun 2015 penulis bergabung di lembaga riset yang fokus pada kajian-kajian kritis agraria, yaitu Agrarian Resources Center (ARC) Bandung.

Lampiran

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sinjai Tengah Berdasarkan Desa, Tahun 2009-2014

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2009	2010	2012	2013	2014
1	Kompang	2.152	2.071	2.071	2.073	2.030
2.	Saontanre	1.676	1.687	1.702	1.948	1.945
3.	Baru	2.027	1.951	1.940	2.052	2.037
4.	Saotengnga	3.016	3.022	3.027	3.077	3.029
5.	Pattongko	3.779	3.720	3.675	3.753	3.696
6.	Bonto	2.043	1.622	1.646	2.137	2.142
7.	Saohiring	2.631	2.561	2.531	2.631	2.612
8.	Kanrung	3.130	3.052	3.041	3.186	3.151
9.	Samaenre	2.319	2.347	2.315	2.355	2.415
10.	Mattunreng Tellue	2.579	2.625	2.624	2.715	2.712
11.	Gantarang	1.686	1.558	1.574	1.790	1.738
TOTAL		27.038	26.216	26.146	27.717	27.507

Sumber: (BPS,

2010; 2012; 2013; 2014).

Lampiran 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kompang, 2010

No	Desa	Mata Pencaharian (jiwa)					
		Pertanian Bahan Ma- kanan	Peter- nakan	Perke- bunan	Perdaga- ngan	Industri	PNS
1.	Kompang	280	132	377	30	32	17
2.	Saotanre	242	110	280	27	25	12
3.	Baru	247	155	298	29	30	28
4.	Saotengga	295	277	477	63	37	108
5.	Pattongko	464	280	505	66	48	20
6.	Bonto	210	115	232	32	35	10
7.	Saohiring	350	229	382	50	50	25
8.	Kanrung	462	333	557	65	33	62
9.	Samaenre	287	223	422	74	47	75
10.	Mattunreng Tellue	445	303	490	45	45	11
11.	Gantarang	205	130	247	35	48	7
TOTAL		3.487	2.287	4.267	516	430	375

Sumber: (BPS, 2010)

- Litbang Deptan. (2007). *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Cengkeh Edisi Kedua*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Litbang Pertanian. (n.d.). *Produksi Cengkeh Nasional*. Retrieved Februari 11, 2016, from Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan: <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=4219>
- Ngakan, P. O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K., & Tako, A. (2005). *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi yang Mandiri*. Bogor: CIFOR.
- Payo-Payo, P. P. (2015). *Pinus di Desa Kompang*. Belum dipublikasikan.
- Payo-payo, S. R. (2013). *Laporan Naratif PfR Kompang dan Gantarang*. Kabupaten Sinjai.
- Pedoman, Koran. (2015, Desember 31). *Gernas Gagal Sejahterakan Petani Perkebunan*. Retrieved Februari 24, 2016, from <http://koranpedoman.com/2015/12/31/gernas-gagal-sejahterakan-petani-perkebunan/>
- Ramlah, S., & Suprapti. (2005). Studi Mutu Biji Kakao Biji Sulawesi Selatan Pada Tingkat Pedagang Pengumpul Primer Kabupaten. *Majalah KIMIA*.
- Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Salim, I., & Ni'am, L. (2014). *Merancang Bangun Sistem Keselamatan Rakyat: Pengalaman Kelola Bencana di Lima Kabupaten (Maluku Tenggara, Sinjai, Ende, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah)*. Yogyakarta: Insistpress.
- Siagian, J. (2013). *Peranan Program Rehabilitasi Gernas Kakao dalam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*. Makassar: Pascasarjana Program Studi Sistem-Sitem Pertanian (SPP) Universitas Hasanuddin.
- Siagian, V. J. (2014). *Outlook Komoditi Cengkeh*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- Sirimorok, N. (2013, Oktober 1). Catatan Perjalanan tentang Satu Bahasa. *Rubrik Literasi KTM*.
- Sirimorok, N., Batiran, K., & Sanusi, R. (2014). Bermukim di Lereng Maut: Bagaimana Bencana Tercipta di Dua Desa Sulawesi Selatan. *Transformasi Sosial*, 16.
- Suleman, I., Imran, A., & Zubair, H. (2014). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Sebaran Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Mustek Anim*.
- Susanti, A. A. (2014). *Outlook Komoditi Kakao*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Suryawan, A. (2013). Peranan APRIS dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Keutuhan RIS Tahun 1949-1950. *AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah, Volume 1, No. 1, 2*.
- Syari'ati, A. (2015). *Biografi Abdul Kahar Muzakir(1925-1960)*. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Tim Peneliti Industri Kakao Indonesia. (2008). *Program Gerakan Nasional Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS)*. Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Australia Indonesia Partnership (AIP), ASKINDO, SADI, ACIAR dan Penelitian Industri Kakao Indonesia.

Tim Peneliti Payo-payo. (2015). *Pinus di Desa Kompang*. Makasar: Belum dipublikasikan.

Turner, J. (2011). *Sejarah Rempah: Dari Erotisme Sampai Imperialisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Wahid, A. Y., Bohari, N., & Achmad. (2015). Penegakkan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan: Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Hasanuddin Law Review*, 1 (1).

Daftar Peraturan

- UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
- UU No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Keppres No. 8 tahun 1980 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri
- Keppres No. 35 Tahun 1980 tentang Dana Reboisasi
- Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Keppres No. 40 Tahun 1993 tentang
- Inpres Nomor 8 tahun 1976 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi
- Inpres No. 4 tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa Dari Petani Cengkeh
- PP No. 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kabupaten ke Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur
- PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
- PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 313/MPP/KEP/9/1997 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh
- SK Menteri Pertanian No. 760/kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan
- SK Menteri Pertanian dan Kehutanan No 890/kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
- SK Menteri Kehutanan RI No. 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.50/Menhut-11/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKM)
- Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 jo surat Menhut No. 1712/Menhut-VII/2001

Perda Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemekaran Desa Kompang dan Pembentukan Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah

Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai 2012-2023

Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan Informan	Tanggal Wawancara
1.	Sultan Alwy	Kepala Dusun Bonto	15 Oktober 2015
2	Sayuti Hajarang	Puang Dusun Bonto dan merupakan pemimpin dari tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Bonto	8 Oktober 2015 dan 22 November 2015
3	Asikin Dg. Pella	Kepala Dusun Barugae	
4	Ansar	Kepala Desa Kompang	29 September 2015 dan 3 Oktober 2015
5	Ibu Suryani	Salah seorang warga di Dusun Bonto	6 Oktober 2015
6	Anwar	Salah seorang warga di Dusun Bonto	9 Oktober 2016
7	Dahlan	Salah seorang warga di Dusun Bonto	1 Oktober 2015
8	Unding	Ketua RK 07 Kampung Lappara' Dusun Bonto	20 Oktober 2015
9	Bakrin	Salah seorang warga di Dusun Bonto	14 Oktober 2015
10	Tajuddin	Salah seorang warga di Dusun Bonto	22 Oktober 2015
11	Rosmiati	Salah seorang warga di Dusun Bonto	30 September dan 14 November 2015
12	Erna	Salah seorang warga di Dusun Bonto	14 November 2015
13	Pak Hasyir	Salah seorang warga di Dusun Bonto	16 November 2015